DEWANPERS

PT. PELITA MEDIA PERKASA
Telah Terverifikasi Dewan Pers Secara Administrasi Maupun Factual, dan Terdaftar Sebagai Anggota SPS (Serikat Perusahaan Pers)
#CEK GOOGLE#

EDISI 1869 | JUMAT, 13 NOVEMBER 2026

HARIAN UMUM
Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

BACA DIMANA SAJA DAN KAPAN SAJA
PELITA BARU DI MYEDISI
myedisi
DAPATKAN DI Google Play

HOTLINE 0251- 200 5017 | 0812-1161-3375 - www.pelitabaru.com -
HARGA ECERAN LUAR PULAU JAWA RP8.500,- DITAMBAH ONGKIR
HARGA ECERAN | Rp7.500,-



Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,"

- Prabowo Subianto -
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DINILAI SIKAP KSATRIA DAN NEGARAWAN

PRABOWO BERAT HATI MENERIMA SURAT BERHENTI GIBRAN

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/2026).

Jakarta, Pelita Baru

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/2026).

"Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti

11

PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL HARUS DIPERJELAS DAN RUU


TAUFAN PAWE

Jakarta, Pelita Baru

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta para akademisi memberikan masukan yang konkret mengenai pengaturan, khususnya masa transisi pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

Menurutnya, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara jelas melalui pengaturan hukum.

Tak hanya itu, Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu meny-

11

PENYADAPAN PRESIDEN, KOMISI III MINTA KAPOLRI TERAPKAN PASAL MAKAR


HABIBUROKHMAN

Jakarta, Pelita Baru

KOMISI III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.

Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama

11

LEBIH ELEGAN, PENGUNDURAN DIRI GIBRAN DEMI STABILITAS NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM


SARIFUDDIN SUDDING

Jakarta, Pelita Baru

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai wakil presiden merupakan langkah yang tepat. Mundurnya Gibran ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA-nya yang dinyatakan tidak sah.

"Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal

11

FOTO COVER (HANYA ILUSTRASI): SUMBER: *https://chatgpt.com/*

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA
HOTLINE: 0812-1161-3375 (Hunting)
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

Komisi II Dorong Bawaslu Miliki Kewenangan Eksekutorial

Jakarta, Pelita Baru

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasalnya, rekomendasi pencegahan pelanggaran yang dikeluarkan Bawaslu perlu memiliki daya paksa dan konsekuensi hukum agar tidak diabaikan oleh pihak-pihak terkait.

Aria menilai, selama ini Bawaslu sebenarnya telah mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini pada setiap tahapan pemilu. Namun, peringatan dan rekomendasi yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga fungsi pencegahan belum berjalan optimal.

"Bawaslu sudah mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran itu di setiap tahapan, bahkan beberapa peringatan sudah diberikan sejak dini. Tetapi, peringatan-peringatan itu diabaikan begitu saja," ujar Aria dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan RUU tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebagai contoh, paparnya, potensi pelanggaran berupa mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaknetralan aparat yang sebenarnya dapat diidentifikasi sebelum masa kampanye. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat agar rekomendasi Bawaslu tidak sekadar menjadi catatan administratif.

Karena itu, Aria menekankan revisi UU Pemilu perlu memberikan kekuatan eksekutorial kepada Bawaslu. Dengan kewenangan tersebut, rekomendasi dan peringatan pencegahan yang dikeluarkan lembaga pengawas pemilu diharapkan memiliki konsekuensi hukum sehingga dapat dipatuhi oleh pihak yang menjadi sasaran pengawasan.

Penguatan kewenangan tersebut juga dinilai penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral. Dirinya mengingatkan, persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang terus berulang tanpa langkah korektif berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Selain melalui penguatan regulasi, ia menilai peningkatan integritas dan kapasitas anggota Bawaslu serta pengawasan partisipatif perlu menjadi perhatian. Kolaborasi antarlembaga negara, masyarakat, pengawas independen, dan mahasiswa juga perlu diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pengawasan.

"Kami ingin memberikan satu kekuatan yang eksekutorial kepada Bawaslu yang mempunyai mandat penegakan, sehingga Bawaslu mempunyai kekuatan untuk menindak," tegasnya. **(fex/*)**

Restrukturisasi BUMN Jangan Korbankan Tenaga Kerja

Jakarta, Pelita Baru

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan negara tidak mengorbankan tenaga kerja.

Penataan aset, penggabungan perusahaan, hingga pembentukan holding harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kasihlah kesempatan buat Danantara dan BUMN untuk mengelola betul aset-aset negara kita. Yang pasti, semua itu bukan hanya kepentingan dividen untuk kepentingan korporasi saja, tapi bagaimana itu bermanfaat buat masyarakat, bagi bangsa Indonesia ke depannya," ujar Nasim usai Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, restrukturisasi sejumlah BUMN bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut akan ditutup atau dihilangkan. Penataan dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti akuisisi, penggabungan, dan pembentukan holding agar pengelolaan perusahaan lebih terintegrasi dan efisien.

Ia mencontohkan penataan sektor perkebunan melalui PTPN yang sebelumnya terdiri atas PTPN I hingga PTPN XIV, kemudian disederhanakan menjadi empat entitas. Meski struktur organisasi dan pengelolaan berubah, keberlangsungan operasional perusahaan serta nasib tenaga kerja harus tetap menjadi perhatian.

Karena itu, politisi Fraksi PKB tersebut mengingatkan agar transformasi dan pembentukan holding BUMN tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi atau menutup lapangan pekerjaan.

Dirinya juga meminta Danantara dan BUMN memberikan kejelasan serta menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan.

"Transformasi, restrukturisasi, holdingisasi dan yang semua terjadi ini bukan berarti menutup tenaga kerja kepada masyarakat. Permasalahan-permasalahan PHK yang terjadi, beberapa perusahaan-perusahaan ada terjadi masalah dengan karyawan-karyawan itu harus jelas. Kami minta tolong untuk Danantara dan BUMN untuk menyelesaikan semuanya," tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah BUMN yang menghadapi persoalan keuangan hingga tidak lagi mampu menghasilkan keuntungan. Menurutnya, persoalan perusahaan-perusahaan tersebut harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penanganan aset yang telah memasuki proses kurator. Ia mencontohkan persoalan yang terjadi di Jiwasraya, PT Pos Indonesia, PT Leces, dan Merpati.

Berbagai persoalan lama tersebut, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam agenda penyehatan BUMN. Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya menghasilkan perusahaan yang lebih efisien, tetapi juga memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban perusahaan, termasuk kepada para pekerja.

Nasim menegaskan, tanggung jawab BUMN tidak sebatas menghasilkan keuntungan dan dividen. Pengelolaan aset negara yang diperkirakan mencapai Rp16.000 triliun harus turut mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"BUMN tetap intinya memang harus mendapatkan dividen besar, tapi mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi dia punya tanggung jawab bagaimana kelompok bangsa ini, rakyat kita," ungkapnya. **(dho/*)**

AKOMODASI TUNTUTAN PUBLIK DAN DAN TEGASKAN EFEKTIVITAS HUKUM

RUU Perampasan Aset Tutup Celah *Under Valuation*



Jakarta, Pelita Baru

KOMISI III DPR RI mengakomodasi sejumlah aspirasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penegasan ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta transparansi penjualan aset rampasan untuk mencegah praktik manipulasi nilai atau under valuation.

Pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan bahwa perhatian terhadap tuntutan masyarakat merupakan bagian dari komitmen DPR dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap aspirasi publik.

"Itu kan tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat," kata Soedeson kepada Parlementaria usai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski RUU Perampasan Aset berfokus pada mekanisme hukum terkait perampasan aset hasil tindak pidana, pembahasan mengenai sanksi tersebut tetap memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam UU Tipikor.

Soedeson menegaskan, ketentuan hukuman mati sebenarnya telah memiliki dasar hukum dalam UU Tipikor. Karena itu, pencantuman atau penegasan isu tersebut dalam pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan bentuk perhatian terhadap aspirasi masyarakat, bukan pembentukan jenis sanksi pidana baru melalui regulasi tersebut.

"Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur," imbuhnya.

Selain persoalan sanksi pidana, pembahasan RUU Perampasan Aset juga memberikan perhatian pada tata cara penjualan aset rampasan. Panja mengatur agar penjualan benda atau aset hasil perampasan dilakukan di muka umum dengan mengedepankan asas publisitas dan transparansi. Mekanisme ini diharapkan dapat mencegah manipulasi harga atau praktik under valuation yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dengan keterbukaan proses penjualan, nilai ekonomis aset rampasan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset hasil tindak pidana berjalan secara akuntabel.

Saat ini, pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah memasuki tahap Timus dan Timsin. Tahapan tersebut difokuskan pada pencermatan, sinkronisasi, dan perapian rumusan pasal serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hasil pembahasan Panja bersama Badan Keahlian DPR RI dan pemerintah sebelum melanjutkan ke tahapan legislasi berikutnya. **(cok/*)**

BAM Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional

Jakarta, Pelita Baru

PENGAJUAN pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang menjadi perhatian publik.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo menilai, proses pengawasan dan tindak lanjut terhadap persoalan tersebut tetap perlu dikawal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, yakni Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Rapat tersebut membahas tindak lanjut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pembahasan berlangsung di tengah dinamika politik menyusul kabar kedatangan Gibran ke kompleks parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran diri.

Anggota BAM DPR RI Harris Turino menegaskan, pengajuan surat pengunduran diri sekalipun tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk mengawal proses konstitusional yang masih menjadi perhatian. Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan prinsip konstitusi dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

"Karena mengajukan surat pengunduran diri secara resmi saja, kalau memang benar itu, ini belum selesai. Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi



tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga," ujar Harris.

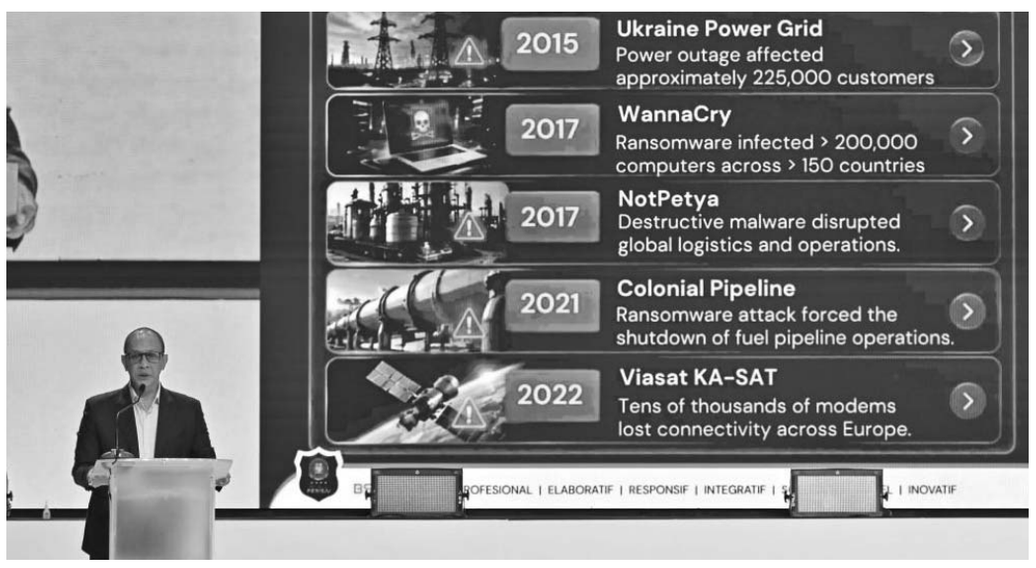
Senada dengan Harris, Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai polemik pencalonan hingga perjalanan Gibran sebagai Wakil Presiden menjadi catatan penting bagi kehidupan ketatanegaraan.

Ia menekankan bahwa kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah dalam pemerintahan harus tetap berjalan melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Yanuar, persoalan administratif yang berujung pada putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran agar proses politik dan ketatanegaraan ke depan berjalan sesuai aturan.

"Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar," pungkas Yanuar. **(cky/*)**

Pemerintah Tingkatkan Pengamanan Infrastruktur Vital Hadapi Ancaman Siber



Jakarta, Pelita Baru

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman siber yang menyasar sektor strategis, termasuk infrastruktur vital nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria mengatakan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya agentic AI, membuat ancaman siber semakin kompleks dan berpotensi dilakukan secara lebih terorganisasi.

Karena itu, Kemkomdigi berkoordinasi dengan BSSN untuk memperkuat langkah antisipasi. Pengamanan infrastruktur utama nasional menjadi ranah BSSN, sedangkan Kemkomdigi berperan menyelaraskan kesiapan ekosistem digital. "Ancaman tersebut menjadi perhatian setelah BSSN mencatat sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman siber dalam kurun 24 jam melalui dasbor FortiGuard Labs. Aktivitas yang terdeteksi antara lain menyasar sektor keuangan, teknologi, dan pemerintahan," Wamen Nezar belum lama ini.

Namun, angka tersebut perlu dipahami secara tepat. Juru Bicara BSSN Prabaswari menjelaskan bahwa 1,6 juta merupakan jumlah percobaan serangan yang terdeteksi perangkat keamanan, bukan jumlah insiden yang dipastikan berhasil menembus sistem.

BSSN juga telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor keuangan sebagai bagian dari penguatan kemampuan penanganan insiden.

Pengguna PDN dan Government Cloud Diminta Waspada

Menindaklanjuti situasi tersebut, Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital telah mengirimkan surat imbauan kepada pengguna Pusat Data Nasional Sementara 1 (PDN-1), Government Cloud, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) publik.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, meminta instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengamanan sistem, termasuk melalui pemantauan jaringan secara lebih intensif.

Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan sistem digital yang digunakan instansi pemerintah dan penyelenggara layanan publik tetap terpantau serta memiliki kesiapan menghadapi potensi gangguan keamanan", ujarnya.

Kemkomdigi Telusuri Isu Kebocoran Data

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar menjelaskan bahwa isu kebocoran data yang beredar saat ini merupakan data lama yang kembali diangkat.

Meski demikian, Kemkomdigi tetap melakukan pengusutan dan penindakan dengan berkoordinasi bersama BSSN serta kepolisian.

Alexander Sabar juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi dan memastikan identitas pihak yang menghubungi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. "Penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kewaspadaan pengelola sistem digital diharapkan dapat memperkuat perlindungan infrastruktur vital serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah," tutupnya. **(din)**

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

HOTLINE: 0812-1161-3375 ***(Hunting)***
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

SIAPA WAPRES POTENSIAL PENGGANTI GIBRAN?

- OLEH: **SUROKIM AS -**

Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute

POLEMIK mengenai masa depan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak yang lebih serius. Bukan semata karena dua putusan pengadilan mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikannya, melainkan karena Gibran pada 10 November 2026 telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana membenarkan adanya pembicaraan itu.

Namun, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses hukum, sementara pemerintah menyatakan ia tetap menjalankan tugas seperti biasa.

Dengan demikian, yang sedang kita hadapi bukan kekosongan jabatan, melainkan kemungkinan transisi yang belum memiliki kepastian politik dan konstitusional. Di titik inilah pertanyaan 'siapa pengganti Gibran?' menjadi penting, walaupun sesungguhnya bukan pertanyaan pertama.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap perubahan pada jabatan wapres berlangsung melalui prosedur konstitusi, tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan, dan tidak berubah menjadi transaksi pembagian kekuasaan di antara elite. Nama calon pengganti baru relevan setelah status jabatan benar-benar kosong.

Dua putusan pengadilan perlu dibaca secara cermat dan tidak dicampuradukkan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Sementara itu, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara tata usaha negara dan menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pejabat kementerian terkait, sekaligus memerintahkan pencabutannya. Putusan MA tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa.

Namun, putusan itu tidak dengan sendirinya berarti jabatan wakil presiden otomatis kosong. Di sinilah pentingnya membedakan pembatalan keputusan administrasi, penilaian atas syarat pencalonan, dan mekanisme konstitusional pemberhentian atau pengunduran diri pejabat yang telah dilantik.

Sebenarnya konstitusi telah menyediakan jalurnya. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat, MK memeriksa dan memutus pendapat tersebut, kemudian MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan kuorum dan persetujuan konstitusional.

Adapun jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa paling lambat 60 hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, Presiden memegang kewenangan mengajukan nama, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

Ketentuan ini memberi Prabowo posisi strategis, tetapi bukan cek kosong. Ia harus mengajukan dua nama yang tidak hanya dapat diterima secara personal, melainkan juga memiliki legitimasi politik yang cukup untuk memperoleh dukungan MPR.

Pengisian jabatan wakil presiden akan mengubah konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh, dan pola komunikasi antara Istana dengan parlemen. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak cukup didasarkan pada kedekatan, loyalitas, atau popularitas figur.

Dalam kajian politik Indonesia, Marcus Mietzner (2023) menggunakan konsep coalitional presidentialism untuk menjelaskan bagaimana presiden membangun dan merawat koalisi guna mengonsolidasikan kekuasaan. Koalisi di Indonesia tidak hanya bekerja melalui partai dan parlemen, tetapi juga melibatkan beragam aktor politik, birokrasi, kelompok sosial, dan jejaring kekuasaan.

Konsekuensinya, pergantian wapres bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penataan ulang hubungan antaraktor yang menopang pemerintahan. Prabowo harus menghitung apakah figur baru memperkuat kapasitas koordinasi atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru.

Delapan Nama

Delapan nama yang beredar dapat dibaca sebagai delapan skenario politik, bukan sebagai daftar kandidat resmi. Puan Maharani, misalnya, berpotensi membuka kanal komunikasi yang lebih luas dengan PDI Perjuangan.

Pengalamannya sebagai Ketua DPR dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi modal institusional untuk menjembatani eksekutif dan legislatif. Namun, perpindahan Puan akan



memunculkan konsekuensi lanjutan terhadap kepemimpinan DPR dan posisi politik PDI Perjuangan. Kedekatan komunikasi tidak boleh dibayar dengan melemahnya fungsi pengawasan parlemen.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menawarkan kesinambungan dari dalam kabinet. Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki pengalaman pemerintahan dan basis organisasi politik.

Penunjukannya dapat memperkuat representasi Demokrat, tetapi sekaligus menuntut perhitungan ulang keseimbangan di antara partai-partai koalisi. Wapres ideal bukan sekadar memperbesar porsi satu partai, melainkan memperbaiki koordinasi pemerintahan secara keseluruhan.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menawarkan modal yang berbeda. Ia memiliki legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, dan simbol pemersatu. Dalam koalisi yang berisi banyak kepentingan, figur dengan daya terima lintas kelompok dapat berfungsi sebagai penurun ketegangan.

Namun, kekuatan simbolik perlu diterjemahkan menjadi kapasitas kerja dalam pemerintahan nasional. Stabilitas tidak cukup dibangun melalui ketokohan, ia membutuhkan mandat, pembagian kerja, dan kemampuan mengambil keputusan.

Sufmi Dasco Ahmad menawarkan kedekatan koordinasi dengan Presiden dan Gerindra, serta pengalaman mengelola dinamika parlemen. Keuntungan ini dapat memperpendek jalur komunikasi politik.

Namun, menempatkan dua figur dari partai yang sama pada pucuk eksekutif berisiko menimbulkan persepsi dominasi dan mengurangi rasa memiliki mitra koalisi lain. Dalam politik koalisi, efisiensi koordinasi harus berjalan beriringan dengan inklusivitas.

Khofifah Indar Parawansa menawarkan kombinasi pengalaman pemerintahan, kekuatan sosial, dan legitimasi politik yang cukup kuat. Sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial, Khofifah memiliki pengalaman mengelola pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional. Posisinya sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama juga memberinya jejaring sosial yang luas, terutama di kalangan perempuan dan komunitas akar rumput.

Bagi Prabowo, Khofifah dapat menjadi pilihan strategis untuk memperkuat jembatan politik dengan Jawa Timur sekaligus memperluas basis penerimaan pemerintahan di kalangan masyarakat Nahdliyin. Kehadirannya juga membawa dimensi representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional.

Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola konsekuensi politik dan administratif jika ia harus meninggalkan jabatan gubernur, sekaligus memastikan bahwa pengangkatannya tidak sekadar menjadi akomodasi politik, tetapi benar-benar memperkuat efektivitas pemerintahan.

Muhaimin Iskandar juga memiliki modal yang patut diperhitungkan. PKB memperoleh 68 kursi DPR pada Pemilu 2024, sehingga memiliki kekuatan parlementer yang signifikan. Pengalaman Muhaimin di kabinet dan kepemimpinan partai dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan salah satu kekuatan politik besar.

Namun, penguatan PKB melalui jabatan wakil presiden berpotensi mengubah keseimbangan internal koalisi. Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah PKB mendukung pemerintah, melainkan apakah penambahan pengaruh itu membuat koalisi lebih efektif dan akuntabel.

Adapun Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan skenario rekonsiliasi dengan salah satu rival utama Prabowo dalam Pilpres 2024. Secara simbolik, pelibatan Anies atau Mahfud MD dapat memperluas basis penerimaan politik pemerintahan.

Namun, rekonsiliasi elite tidak otomatis menghasilkan rekonsiliasi pemilih. Anies dan Mahfud juga harus mempertimbangkan ruang kerja, mandat, dan konsekuensi terhadap posisi politiknya sendiri. Karena belum ada pernyataan kesediaan, namanya lebih tepat dibaca sebagai kemungkinan analitis ketimbang kandidat faktual.

Di luar delapan figur tersebut, terdapat dimensi lain yang tidak boleh diabaikan yakni posisi Joko Widodo dan PSI. Kendati PSI tidak memperoleh kursi DPR pada Pemilu 2024 sehingga tidak memiliki fraksi sendiri di parlemen, tetapi pengaruh politik tidak selalu identik dengan jumlah kursi.

Jejaring personal dan hubungan elite tetap dapat bekerja di luar struktur formal partai. Jika Gibran kelak tidak lagi menjabat, salah satu kanal pengaruh keluarga Jokowi di dalam pemerintahan mungkin berubah. Meski demikian, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi otomatis berakhir tentu terlalu jauh.

Persoalan yang lebih besar bagi Prabowo adalah bagaimana menghindari apa yang kerap disebut sebagai dual power atau persepsi "matahari kembar". Dalam pemerintahan, dua pusat pengaruh yang saling bersaing dapat mengaburkan arah komando, memperlambat keputusan, dan membuat birokrasi membaca sinyal politik yang berbeda.

Namun, mengganti wapres semata-mata untuk memusatkan kekuasaan juga bukan jawaban demokratis. Konsolidasi yang sehat harus memperkuat koordinasi tanpa mematikan checks and balances.

Oleh karena itu, ukuran utama calon pengganti Gibran semestinya bukan siapa yang paling dekat dengan Prabowo atau siapa yang paling besar daya tawarnya di antara partai koalisi. Ukurannya adalah siapa yang mampu menjalankan mandat konstitusional, membantu Presiden mengelola pemerintahan dan menjaga hubungan dengan parlemen.

Kemudian, siap mengambil alih tugas kepresidenan apabila keadaan mengharuskannya. Wapres tentu saja bukan sekadar pelengkap tiket politik, apalagi hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi.

Pada akhirnya, ujian bagi Prabowo bukan hanya memilih satu dari sekian nama. Ujian sesungguhnya ialah memastikan bahwa proses pengisian jabatanjika kelak terjadi tidak mengorbankan kepastian hukum, etika demokrasi, dan kepentingan publik.

Negara tidak boleh diperlakukan seperti ruang perundingan elite yang hanya sibuk membagi posisi. Di tengah polemik ini, publik berhak memperoleh satu kepastian yakni siapa pun wapres berikutnya harus hadir untuk memperkuat pemerintahan konstitusional, bukan sekadar memperkuat koalisi kekuasaan. **(*)**

Transformasi Digital Pendidikan Harus Menjangkau Madrasah

Jakarta, Pelita Baru

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional harus berlandaskan prinsip keadilan (fairness) agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan dan kualitas layanan pendidikan yang setara.

Hal tersebut disampaikan Hetifah usai mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, selain memperkuat integritas dan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, kebijakan publik juga harus mampu menjawab persoalan ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat.

"Selain integritas yang lebih tinggi dan pemerintahan yang lebih responsif, kita juga diharapkan menghadirkan kebijakan yang mendorong keadilan atau fairness," ujar Hetifah.

Ia menjelaskan, berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan belum sepenuhnya menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan. Ketimpangan masih terlihat, baik antara sekolah negeri dan swasta, wilayah perkotaan dan daerah terpencil, maupun pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Menurutnya, persoalan tersebut semakin nyata di tengah percepatan transformasi digital pendidikan. Salah satu contohnya adalah perbedaan ketersediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi antara madrasah dan sekolah umum.

"Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda," ungkapnya.

Hetifah menegaskan, kesenjangan fasilitas tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam merumuskan kebijakan transformasi digital pendidikan. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tanpa membedakan jenis maupun status lembaga pendidikan.

Menurutnya, DPR RI juga perlu merespons persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan agar transformasi pendidikan tidak justru memperlebar kesenjangan, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

"Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR," pungkasnya.

(din)



HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

PENERBIT	**: PT PELITA MEDIA PERKASA**
SK Menkumham RI Nomor	: AHU-0011559.01.01 Tahun 2019
Akta Notaris	: Nomor: 03 Bambang Suharnomo, SH, M.Kn
SK Domisili	: Nomor: 503/07/III/2019
SIUP-NIB : Npmor	: 91200093201589
SK Terdaftar Pajak	: S-7933KT/WPJ 33/KP 0703/2019
NPWP	: 90.702.074.7-404.000
REK BANK JABAR-BANTEN	: 009 3791 56 8001 A/N: PT PELITA MEDIA PERKASA
No Anggota SPS	: 664/2019/12/A/2019

Pemimpin Umum: HRM Danang Donoroso S.IP. , **Wakil Pemimpin Umum:** Rohadi, **Pemimpin Redaksi:** HRM Danang Donoroso S.IP., **Wakil Pemimpin Redaksi:** M Periksa Ginting, **Redaktur Senior:** Agung HP. **Redaktur Pelaksana:** Fuz Fauzan, **Redaktur Daerah:** Rohadi, Coki Pasaribu. **Dewan Redaksi:** HRM. Danang Donoroso, Jayanto Arus Adi, M. Periksa Ginting, Fuz Fauzan, Aldi Supriyadi, Agung hp, Rohadi, Coky Pasaribu, Jefri Sukapura, Heri Supriatna, Asep Syaefudin (Bucek). **Biro Bekasi Raya:** Anes Prabowo, **Biro Bandung Barat:** Heni Suhaeni, **Biro Bandung Kota/Kab:** Iswan Darsono, **Biro Depok:** Indra Purwoko, Ma'asyobirin, Indra Abert Nego. **Biro Banten Raya:** Sarinan, Jesman Sinaga, Masrilsyah, Irwan Hermawan **Biro Lebak/Rangkas:** Irfan Hilmi, **Biro Garut:** Raja Risnandi Firdaus, **Biro Jogja:** Sri Handayani, **Biro, Malang:** Dian Citra, **Biro kebumen:** Marisah, **Biro Medan:** Ali N Pasaribu, **Biro Lampung:** M. Tole, **Biro Palembang:** Nurdiansyah, **Biro Jambi:** Amos Sinaga, **Biro Tanjung Pinang (Kepri):** Kennedy Sihombing, **Biro Riau:** Markus. N, **Biro Aceh Tenggara:** M. Bagariang, **Biro Kalbar:** Melki,

Sekretaris Redaksi: Dian Puspita, **Pemimin Perusahaan:** M. Donduan Jutawan SH. **Manajer Iklan & Pemasaran:** Syarifah, Ruswandi, **Manajer Sirkulasi:** Suparwi, **Keuangan:** Suparwi, Saharah, **Desain Grafis/Layout:** Handy' Mehonk' Purnama (Koordinator), **Pengawas Cetak:** Suripto (Jodi), **Penasehat Hukum:** Sugeng Teguh Santoso, SH (KETUA IPW), Advokat Nur Cholis (Ketua Kantor Hukum ABRI)

ALAMAT REDAKSI & TATA USAHA: Gedung Harian Umum Pelita Baru, Jalan Raya Pemda Pasir Jambu No 9 (Parakan Kembang), Sukaraja, Bogor, **HOTLINE:** 0813-1839-6433 (Hunting). **KANTOR BIRO BEKASI RAYA:** Jalan Kartini No 11, Bekasi Timur, Kota Bekasi. **KANTOR BIRO BOGOR:** Jalan raya Sukahati No 9, Cibinong, Bogor. **EMAIL REDAKSI:** pelitabaruredaksi@gmail.com, **EMAIL IKLAN:** iklanpelitabaru@gmail.com. **EMAIL SIRKULASI:** sirkulasipelitabaru@gmail.com. **TARIF IKLAN:** Black & White (BW) Rp 60,000/mm. Iklan Berwarna (FC) Rp 100,000/mm. Iklan Pengumuman: Rp 26.000/mm. **LAPORAN KEUANGAN:** Rp 25.000/mm. **IKLAN DUKA CITA/KELUARGA:** Rp 15.000/mm. **IKLAN BARIS:** Rp 25.000/brs. (Belum Termasuk PPN). **LANGGANAN KORAN:** Untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Rp 7.500/ eksemplar + ongkos kirim Rp 500,-, **PERCETAKAN:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika, Jalan Raya Benda No 26 C, Tangerang, Banten.

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA
HOTLINE: 0812-1161-3375 (Hunting)
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/



Kursi Wapres Kosong, Ekonomi Nasional Tetap Solid

Jakarta, Pelita Baru

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons dinamika politik nasional terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI.

Di tengah sorotan pasar terhadap isu tersebut, Airlangga memastikan bahwa ketahanan ekonomi nasional tetap solid dan tidak mudah goyah oleh turbulensi politik.

Airlangga menekankan bahwa para pelaku pasar dan investor global memiliki kalkulasi yang jauh lebih rasional. Menurutnya, indikator makroekonomi dan kepastian iklim usaha tetap menjadi kompas utama investor dalam menanamkan modalnya, melampaui hiruk-pikuk panggung politik jangka pendek.

"Kalau investor, yang paling penting kan prospek perekonomian," tegas Airlangga, Kamis (12/11/2026)

Ia memaparkan bahwa pergerakan ekonomi suatu negara pada dasarnya bertumpu pada dua pilar utama, yakni fundamental dan sentimen. Meskipun sentimen jangka pendek kerap memicu fluktuasi, termasuk memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah akibat guncangan informasi.

Airlangga menggarisbawahi bahwa kematangan fundamental ekonomi Indonesia terbukti mampu meredam guncangan tersebut. Hal ini tercermin dari kinerja pasar modal domestik yang masih bertahan di zona positif pada perdagangan hari ini.

"Kita berharap dengan kematangan fundamental perekonomian, gejolak geopolitik maupun politik nasional itu bisa dihadapi dengan aktivitas ekonomi yang terus berjalan," ujar Airlangga.

Airlangga menyebut perhatian investor asing justru tertuju pada agresivitas Indonesia dalam memperluas jejaring perdagangan bebas dan kemitraan strategis internasional. Sejumlah agenda ekonomi berskala besar tengah dikebut pemerintah dan dinilai menjadi katalisator positif bagi aliran modal masuk.

Pertama, kelanjutan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang terus dipantau ketat oleh pelaku bisnis Eropa.

Kedua, akselerasi proses aksesi Indonesia untuk bergabung dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), blok perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) multilateral bergengsi di kawasan Pasifik.

Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan kesiapan teknis lintas kementerian menyusul diterimanya kuesioner resmi dari Vietnam sebagai salah satu tahapan krusial keanggotaan.

Keberhasilan masuk ke dalam blok CPTPP diproyeksikan bakal membuka keran ekspor dan akses pasar baru secara signifikan bagi produk unggulan Indonesia ke negara-negara mitra nontradisional maupun pasar utama seperti Inggris, Peru, dan Meksiko.

Selain kedua perjanjian perdagangan tersebut, pasar juga tengah menantikan pengumuman penting terkait peta jalan ekonomi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dijadwalkan rilis pada 25 November mendatang.

Pemerintah optimistis pengumuman dari organisasi negara-negara maju tersebut akan memberikan suntikan sentimen positif yang memperkukuh kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia.

"Dengan berbagai bantalan kerja sama global dan aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, pemerintah meyakini transisi maupun dinamika politik di tingkat elite tidak akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

(hrs/fuz/*)

Harga Aci Meroket, Zulhas Minta UMKM Bersabar



Jakarta, Pelita Baru

LONJAKAN harga tepung tapioka atau aci yang meroket hampir 30 persen kian mencekik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner. Namun, pemerintah memastikan belum akan membuka keran impor demi melindungi petani singkong lokal yang baru menikmati manisnya kenaikan harga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta pelaku UMKM kuliner bersabar menghadapi gejolak harga ini. Menurutnya, mahalnya bahan baku singkong dipicu oleh musim kemarau panjang yang baru saja berakhir.

"Memang ini kan lagi musim kemarau panjang, baru sekarang hujan. Kalau sekarang hujan, berarti panennya nanti kira-kira Januari atau Februari," ujar Zulhas, dikutip Kamis (12/11/2026).

Zulhas menegaskan, opsi impor tapioka sengaja tidak diambil agar momentum perbaikan nasib petani lokal tidak rusak. Ia optimistis harga aci akan kembali melandai secara alami saat masa panen tiba pada awal 2027 mendatang.

"Soal tapioka, sabar sedikit. Kalau kita buka impor, nanti petaninya nangis lagi. Sudah puluhan tahun menderita, sekarang petani lagi gembira karena harganya bagus. Biarkan dulu, toh nanti Januari-Februari panen," tegasnya.

Zulhas mengaku melihat langsung fenomena shrinkflation di lapangan, di mana pedagang makanan terpaksa memperkecil ukuran dagangannya agar harga jual tetap terjangkau pembeli.

Sebagai jalan tengah untuk menekan biaya produksi pelaku usaha makanan, pemerintah melelang 380.000 ton beras Bulog berusia simpan satu tahun seharga Rp11.000 per kilogram. Beras tersebut dapat diolah menjadi tepung sebagai bahan baku alternatif pembuatan kue hingga bihun.

Di luar sektor UMKM, pemerintah juga menyiapkan bantalan daya beli masyarakat berupa bantuan pangan 1 juta ton beras untuk 33,2 juta keluarga (desil 1–4 DTSEN) melalui Koperasi Desa (Kopdes), serta menggelontorkan 1 juta ton beras subsidi seharga Rp12.500 per kilogram atau jauh di bawah harga pasar yang menyentuh Rp15.500 per kilogram.

Di tingkat hilir, tekanan harga ini sudah dirasakan langsung oleh para pedagang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Linda Al Amin, mencatat harga tepung aci di hampir seluruh kabupaten/kota di Jabar telah menembus Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram melonjak hampir 30 persen dari harga normal Rp10.000–Rp14.000 per kilogram.

Kondisi ini memukul mundur pedagang jajanan rakyat seperti cilok dan cireng. Wasitah (57), pedagang makanan ringan di Pasar Balubur Town Square, Bandung, mengaku terpaksa menyiasati porsi dagangannya setelah harga aci kemasan 25 kilogram melambung dari Rp280 ribu menjadi lebih dari Rp400 ribu per karung.

"Jadi yang tadinya seporsi sekian, sekarang pilihannya ditambahin harga atau dikurangin sedikit porsinya. Kami takut pembeli komplain kemahalan," keluhnya. **(fuz/*)**

Pasir Kuda Bogor Dongkrak UMKM Wilayah Lewat Digital

Kota Bogor, Pelita Baru

MENJALANKAN roda pemerintahan di tingkat kelurahan tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dengan segala keterbatasan kewenangan dan lahan.

Hal inilah yang disampaikan oleh Lurah Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Wildan Rayhan, saat membahas arah program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya dihadapan awak media, pada Kamis 12 November 2026.

Wildan menegaskan bahwa pihaknya memilih fokus pada program sederhana namun memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pihak kelurahan memposisikan diri sebagai pendamping sekaligus fasilitator.

"Berbagai upaya kolaborasi terus dijajaki, mulai dari sinergi dengan pihak kecamatan hingga optimalisasi koperasi demi mendukung ruang gerak para pelaku usaha," ujar Wildan.

Meski sempat terkendala keterbatasan lahan fisik di wilayah Pasir Kuda yang relatif sempit, pihak kelurahan tidak kehabisan akal. Pelaku UMKM yang sebagian besar bergerak di bidang kuliner serta kerajinan Ecoprint didorong untuk merambah pasar digital melalui platform online.

Tidak hanya itu, kelurahan juga pernah memfasilitasi pelatihan pembuatan logo produk guna meningkatkan daya tarik visual bagi para konsumen. "Kita mah hanya membuka jalannya doang, sebetulnya. Setelah itu ya kembali kepada merekanya sendiri mau apa inovasi," kata Wildan.

Di luar pengembangan UMKM, Kelurahan Pasir Kuda juga tengah gencar-gencarnya mengoptimalkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjelang akhir tahun. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan mengingatkan Wajib Pajak (WP) secara berkala guna meminimalisir tunggakan tanpa unsur paksaan yang kaku.

"Strategi jemput bola dan pengingat tahunan ini membuahkan hasil positif. Berdasarkan data kami, tingkat kesadaran warga Pasir Kuda dalam membayar pajak telah mencapai angka hampir 90 persen," ujarnya.

Capaian gemilang ini turut ditopang oleh potensi wilayah, termasuk sektor perkopian seluas 25 hektar yang turut membantu perekonomian serta kontribusi sektor lainnya. Saat ini, pihak kelurahan bersama petugas terus menggenjot sisa target pajak yang memiliki cakupan luasan lebih besar.

"Melalui langkah-langkah konkret yang berpijak pada kebutuhan riil warga, Kelurahan Pasir Kuda membuktikan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan dapat berjalan efektif dari hal-hal yang paling dekat dengan keseharian masyarakat," pungkasnya. **(her/*)**



IESF WEC 2026 Dongkrak Ekonomi Gim Rp36 Triliun

Jakarta, Pelita Baru

GELARAN International Esports Federation World Esports Championship (IESF WEC) 2026 yang diikuti 101 negara tidak sekadar menjadi panggung adu gengsi atlet olahraga elektronik. Pemerintah memproyeksikan turnamen berskala global ini sebagai mesin penggerak efek berganda (multiplier effect) bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, menegaskan bahwa Indonesia harus memaksimalkan status tuan rumah untuk mengkapitalisasi pasar industri gim domestik yang nilainya tergolong raksasa.

Selama sepekan penuh penyelenggaraan, lokasi acara diprediksi akan dibanjiri ribuan wisatawan dan penggemar esports, dengan estimasi rata-rata 2.000 penonton pada setiap pertandingan.

"Indonesia memiliki sekitar 154 juta gamer dengan potensi pasar industri gim mencapai Rp36 triliun. Pasar raksasa ini harus kita kapitalisasi lewat event internasional yang tidak hanya mendorong prestasi atlet, tetapi juga menggerakkan ekonomi kreatif nasional," ujar Erick, dikutip Kamis (12/11/2026).

Kesiapan dan ambisi Indonesia turut mendapat apresiasi dari petinggi federasi esports dunia. Sekretaris Jenderal IESF, Boban Totovski, memuji rekam jejak serta konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem olahraga elektronik global.

"Indonesia bukan sekadar tuan rumah. Kejuaraan ini adalah ruang kolaborasi strategis untuk menentukan masa depan industri esports dunia," tegas Totovski.

Kehadiran kontingen dari 101 negara menjadikan IESF WEC 2026 sebagai pijakan krusial bagi Indonesia, tidak hanya untuk mengukuhkan dominasi sebagai kekuatan baru esports dunia, tetapi juga membuktikan kapasitas sebagai pusat industri gim di kawasan. **(hrs/*)**



250 Ribu Anggota Satlinmas Jabar Dijamin Asuransi

Cirebon, Pelita Baru

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memasang target tegas bagi keamanan lingkungan di wilayahnya seiring dikucurkannya jaminan kesejahteraan bagi ratusan ribu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Sebanyak 250 ribu anggota Satlinmas se-Jawa Barat dipastikan segera mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang dibiayai penuh melalui APBD Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, pemberian jaminan sosial dan insentif yang layak merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi Satlinmas sebagai garda terdepan ketertiban masyarakat. Namun, peningkatan kesejahteraan itu harus dibayar tuntas dengan kinerja nyata di lapangan.

"Kalau Satlinmas sudah diperhatikan kesejahteraannya, sudah mendapatkan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, maka tidak boleh lagi ada tawuran, begal, dan berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya di Jawa Barat!" tegas Dedi, dikutip Kamis (12/11/2026)..

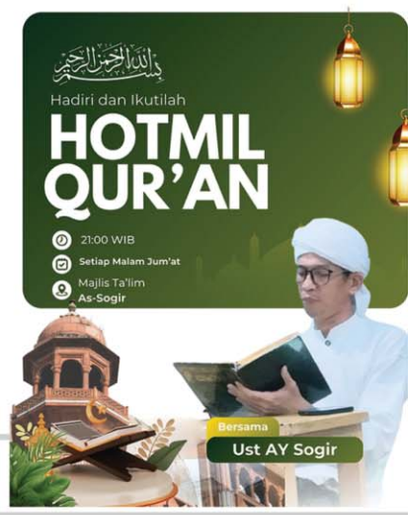
Langkah Pemprov Jawa Barat ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Dewan Pengawas DPP Aslinmas sekaligus Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani.

Ia menilai kehadiran wadah Aslinmas dan dukungan anggaran pemerintah menjadi titik balik pengakuan profesi Satlinmas agar tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelengkap acara kemasyarakatan.

"Satlinmas selama ini memiliki kontribusi besar dalam membantu pemerintah dan masyarakat. Karena itu, profesinya harus diakui dan mendapatkan perlindungan yang memadai," ujar Reda.

Dengan sokongan anggaran dan penguatan kelembagaan ini, Satlinmas diproyeksikan bertransformasi menjadi kekuatan strategis yang mampu menjamin ketahanan sosial dan rasa aman warga di seluruh pelosok Jawa Barat. **(ris/*)**

Info Rakyat Bogor
TAJAM, SANTUN & BERMAKNA
EDISI 1869 | JUMAT, 13 NOVEMBER 2026
www.rakyatbogor.net
HALAMAN 5





"Kita membahas beberapa program strategis daerah, memastikan agar penanganan jalur Puncak dapat teratasi secara langsung di tahun 2027. Pemkab Bogor berkomitmen untuk turut mengambil peran dalam penyelesaian persoalan di kawasan tersebut,"

- Rudy Susmanto -
Bupati Bogor

SIAPKAN LANGKAH INTERVENSI SESUAI KEMAMPUAN FISKAL DAERAH

BUPATI RUDY AKAN MENGURAI PERSOALAN PUNCAK

Usai merencanakan pemerataan pengembangan Kawasan ekonomi di Timur dan Barat Kabupaten Bogor, Bupati kini membidik Puncak, Cisarua sebagai pusat ekonomi warga di bagian selatan Bumi Tegar Beriman.

Bogor, Pelita Baru

USAI merencanakan pemerataan pengembangan Kawasan ekonomi di Timur dan Barat Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Susmanto kini membidik Puncak, Cisarua sebagai pusat ekonomi warga di bagian selatan Bumi Tegar Beriman.

Tak tanggung-tanggung sejumlah langkah intevensi disiapkan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Upaya ini dilakukan mengingat Kawasan Puncak didominasi jalan berstatus nasional dan provinsi.

"Kita membahas beberapa program strategis daerah, memastikan agar

6

HKN 2026, AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI PELOSOK MASIH JADI PR KABUPATEN BOGOR


ADE RUHANDI

Kab Bogor, Pelita Baru

AKSES pelayanan kesehatan terhadap warga di pelosok daerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu diungkap Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade usai memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-62 di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Kamis (12/11/2026).

"Persoalan-persoalan yang tidak terjangkau oleh kami, seperti di wilayah-wilayah yang sarana dan prasarananya perlu mendapat dukungan dari Pemkab Bogor

6

YANYAN ENDIAN: GIBRAN MUNDUR BUKAN JAMINAN PERUBAHAN


YANYAN ENDIAN

Kota Bogor, Pelita Baru

GIBRAN Rakabuming Raka diketahui telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal ini, Yanyan Endian, Advokat YE dan Partner sekaligus budayawan menilai bahwa pengunduran diri Gibran tidak dapat semata-mata disebut sebagai kemenangan konstitusional bagi salah satu pihak.

"Saya menggunakan perumpamaan terminal bus, di mana peristiwa ini ibarat perpindahan penumpang yang turun dan naik secara bergantian dalam perjalanan berbangsa. Menurutnya, pergantian tokoh di

6

CEGAH BANJIR MUSIMAN, KELURAHAN PASIR KUDA BOGOR TATA ULANG SALURAN AIR


WILDAN RAYHAN

Kota Bogor, Pelita Baru

MENGHADAPI ancaman banjir musiman akibat kontur geografis, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor terus menggenjot berbagai langkah mitigasi dan percepatan infrastruktur.

Wilayah RT 1/RW 1 diketahui menjadi titik yang paling sering menjadi langganan genangan air karena posisinya yang lebih rendah dibandingkan aliran sungai.

Lurah Pasir Kuda, Wildan Rayhan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan akselerasi perbaikan signifikan sejak rentang tahun 2024 hingga 2025.

"Karena dia itu kalau

6

FOTO COVER: BUPATI BOGOR RUDY SUSMANTO SAAT MENINJAU MASJID AT-TA'AWUN PUNCAK BOGOR. (DOK. BUPATI BOGOR)

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

HOTLINE: 0813-1839-6433 ***(Hunting)***
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

BOGOR Raya
JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 - **HALAMAN 6** | **EDISI 1869**

Kota Bogor Butuh 700 Guru

Kota Bogor, Pelita Baru

KOTA Bogor kekurangan 700 guru. Hal itu diungkap Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim seraya menyebut, hal ini menjadi alasan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pengajuan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kepada pemerintah pusat.

"Seperti yang kita ketahui bersama di bidang pendidikan, contohnya kita defisit guru 700, kemudian belum terisi jabatan kepala sekolah lebih kurang 30. Kami mengajukan juga di beberapa bidang. Terutama prioritas kami di bidang kesehatan dan pendidikan," ujar Dedie dikutip Kamis (12/11/2026).



Selain pendidikan dan kesehatan, Pemkot Bogor turut mengusulkan kebutuhan pegawai untuk bidang lainnya, termasuk kebinamargaan. Penambahan tenaga di bidang tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.

Kebutuhan akan tambahan pegawai di lingkungan Pemkot Bogor juga semakin mendesak seiring banyaknya aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas. Berkurangnya jumlah pegawai akibat pensiun menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran pelayanan publik.

Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026 mencapai 372 orang. Angka tersebut semakin menambah kebutuhan sumber daya manusia di berbagai perangkat daerah.

Menurut Dani, kekurangan pegawai saat ini tidak terlepas dari belum adanya pengadaan pegawai melalui jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama dua tahun terakhir. Akibatnya, pegawai yang memasuki masa pensiun belum sepenuhnya dapat digantikan dengan tenaga baru.

"Sekarang memang kekurangan SDM, karena sudah dua tahun tidak ada pengadaan pegawai CPNS dan PPPK. Jadi yang pensiun tidak ada penggantinya," kata Dani.

Ia menjelaskan, pengadaan pegawai baru menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan ASN. Pasalnya, kebutuhan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung, sementara jumlah pegawai yang tersedia terus berkurang akibat memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut juga menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penataan sumber daya manusia secara lebih terukur. Penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah agar tidak terjadi ketimpangan jumlah personel antarsektor.

Dalam konteks tersebut, pengisian kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi perhatian penting karena kedua sektor tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemkot Bogor pun berharap usulan 274 formasi CPNS 2026 yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Terutama untuk memenuhi kebutuhan guru, tenaga kesehatan, serta pegawai di bidang strategis lainnya.

Dengan terpenuhinya kebutuhan aparatur secara bertahap, Pemkot Bogor diharapkan dapat memperkuat kinerja birokrasi sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan berkurangnya jumlah ASN akibat pensiun. **(hrs/*)**

Dedie Rachim Terima Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026

Kota Bogor, Pelita Baru

WALI Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026 dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu (11/11/2026).

Turut hadir, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat.

Penghargaan yang diterima Dedie Rachim merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai memiliki kontribusi menonjol dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan daerah yang memberikan dampak positif bagi sekolah swasta sebagai mitra pembangunan sumber daya manusia.

Sebanyak tujuh kepala daerah menerima penghargaan tersebut, terdiri atas dua gubernur, tiga wali kota, dan dua bupati. Di antaranya Gubernur Bali, Gubernur Lampung, Wali Kota Bogor, Wali Kota Padang, Wali Kota Pematang Siantar, Bupati Asahan, dan Bupati Labuhanbatu.

"Alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada BMPS Kota Bogor yang sudah memberikan apresiasi ini, saya mewakili seluruh perangkat di Pemkot Bogor berkomitmen untuk membantu, kemudian berkontribusi juga di dunia pendidikan termasuk perguruan swasta didalamnya," ucap Dedie Rachim.

Dedie Rachim mengaku penghargaan yang diterimanya menjadi suntikan motivasi untuk terus berjuang di dunia pendidikan. "Tentunya ini akan memotivasi kami untuk terus berjuang menghasilkan anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045," ucapnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS), Ki Dr. H. Saur Panjaitan XIII, menjelaskan bahwa banyak kepala daerah memiliki kontribusi dalam bidang pendidikan. Namun, belum semua menunjukkan keberpihakan terhadap perguruan swasta.

Sementara, Pembina/Dewan Pembina PGRI Kota Bogor serta Ketua BMPS Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, merasa bangga atas penghargaan yang diterima oleh Dedie Rachim. Ia berharap, Dedie Rachim dapat terus menjadi teladan yang menginspirasi dunia pendidikan.

"Kami dari BMPS Kota Bogor bangga dengan penghargaan yang diterima oleh Wali Kota Bogor dan tentu kami berharap pak wali menjadi teladan," ucapnya. **(honk/*)**

Sambungan

Bupati Rudy Akan Mengurai Persoalan Puncak

penanganan jalur Puncak dapat teratasi secara langsung di tahun 2027. Pemkab Bogor berkomitmen untuk turut mengambil peran dalam penyelesaian persoalan di kawasan tersebut," kata Rudy dikutip Kamis (12/11/2026).

Rudy menegaskan penanganan persoalan jalur Puncak tidak hanya berkaitan dengan kelancaran lalu lintas, tetapi juga memiliki dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata.

Ia menyebutkan wilayah Ciawi, Megamendung, dan Cisarua merupakan kawasan yang memiliki banyak pelaku usaha sektor pariwisata sehingga membutuhkan dukungan aksesibilitas yang memadai.

Menurut dia, pemerintah daerah ingin memastikan berbagai langkah penanganan jalur Puncak dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan usaha masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan wisata.

"Kita turut serta untuk apa yang dapat kita lakukan dengan kemampuan fiskal yang kita miliki, melakukan beberapa intervensi sehingga para pelaku usaha yang ada di daerah wisata Puncak, Megamendung, Ciawi, Cisarua, kita dapat membantu menghidupkan atau menggerakkan ekonomi di kawasan wisata," katanya.

Rudy mengatakan pembahasan program strategis tersebut dilakukan bersamaan dengan kunjungan pemerintah daerah ke sejumlah lokasi di kawasan Puncak, antara lain kilometer nol Sungai Ciliwung di Telaga Saat dan Masjid At-Ta'awun.

Ambil Alih Masjid At-Ta'awun

Selain jalur wisata, Rudy juga mengungkapkan jika Pemkab Bogor siap mengambil alih pengelolaan Masjid Atta'awun yang berada di kawasan Puncak. Untuk diketahui, selama ini pengelolaan masjid yang menjadi ikon Puncak Bogor itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pengalihan pengelolaan masjid yang berada di wilayah Kecamatan Cisarua ini bertujuan agar pengembangan potensi wisata di kawasan Puncak Bogor menjadi lebih optimal. Tak sebagai wisata alamnya tapi juga wisata religi.

Kawasan tersebut juga memiliki nilai sejarah melalui keberadaan monumen helikopter yang berkaitan dengan gugurnya Pahlawan Nasional Laksamana R.E. Martadinata.

Selain itu, terdapat makam K.H. Idham Chalid di kawasan jalur Puncak yang menjadi bagian dari potensi wisata religi Kabupaten Bogor.

"Kawasan Bogor Selatan memiliki kekayaan potensi wisata yang luar biasa. Tidak hanya keindahan alam, tetapi juga keberadaan para tokoh agama, kiai, ulama, dan habib yang turut berperan dalam kehidupan sosial masyarakat," ujarnya.

Melalui pengembangan wisata alam, religi, dan sejarah yang didukung pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan, ia berharap kawasan Puncak semakin berkembang sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Bogor yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, pengelola desa wisata, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan mendorong sejumlah program melalui perangkat daerah, termasuk sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pariwisata.

"Kita ingin pemerintah berkegiatan memberikan subsidi secara tidak langsung kepada para pelaku dunia usaha yang ada di kawasan Puncak," katanya. **(duan/*)**

Cegah Banjir Musiman, Kelurahan Pasir Kuda Bogor ...



posisinya air lebih tinggi sedikit saja, karena posisi lahannya lebih rendah dari sungai, makanya dia gampang banjir. Tapi sudah kita lakukan banyak yang kita percepat akselerasi untuk perbaikan drainasenya, kemudian pemasangan TPT di sekitaran itu," ujar Wildan kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Selain pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), lanjut Wildan, pihak kelurahan juga menempuh langkah pencegahan jangka panjang melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Para Ketua RW setempat didorong untuk melakukan penataan ulang jalur air.

"Langkah ini bertujuan agar aliran air dari saluran-saluran alami tidak menumpuk di satu titik rendah saja, khususnya di area jembatan yang sempat mengalami banjir beberapa waktu lalu," tegasnya.

Menjawab isu mengenai status zona rawan bencana di wilayahnya, Wildan menegaskan bahwa Kelurahan Pasir Kuda tidak memiliki kawasan yang masuk dalam kategori zona hitam maupun zona merah.

"Kita nggak ada zona hitam, zona merah nggak ada. Kuning paling," kata Wildan.

Untuk wilayah yang masuk dalam kategori zona kuning tersebut, pihak kelurahan langsung bergerak dengan melakukan perbaikan infrastruktur yang mendesak. Fokus utama penanganan mencakup pembangunan TPT preventif serta pembenahan drainase di sejumlah titik yang sebelumnya tertutup atau bahkan belum memiliki saluran air.

Dari pendataan sebelumnya, tercatat ada sekitar enam titik rawan yang memerlukan perhatian khusus. Kendati demikian, penanganan di area-area tersebut kini sudah mulai direalisasikan.

Kata Wildan, pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir ini didukung melalui berbagai sumber pendanaan, baik yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) maupun anggaran reguler Dinas PUPR.

"Dengan langkah-langkah komprehensif ini, kami optimistis dapat meminimalisir dampak risiko bencana alam," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah. Keputusan tegas ini diambil seiring meningkatnya intensitas cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan warga di musim penghujan.

Status darurat tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dalam Apel Sinergi Lintas Sektor di Halaman Mako BPBD Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, pada Jumat (6/11/2026).

Dalam arahannya, Jenal Mutaqin menekankan bahwa mitigasi bencana tidak boleh setengah-setengah. Pemkot Bogor menerapkan pendekatan dua arah: perencanaan jangka panjang yang mengikat dan aksi lapangan yang agresif.

Untuk jangka panjang, Pemkot mewajibkan integrasi peta rawan bencana secara spesifik ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RPJPD. "Siapapun kepala daerah ke depannya wajib memetakan titik wilayah mana yang berisiko bencana secara spesifik, di-breakdown dalam RPJMD. Ini komitmen kita jika ingin serius terhadap penanganan kesiapsiagaan bencana," tegas Jenal.

Sementara untuk jangka pendek, Jenal menyoroti ancaman nyata yang sering dianggap sepele namun berakibat fatal salah satunya sampah di saluran air. Ia menyebut genangan di titik-titik krusial seperti Jalan Sholeh Iskandar, Pajajaran, dan Empang kerap terjadi hanya karena air hujan gagal masuk ke drainase akibat tumpukan sampah.

Sebagai solusinya, gerakan gotong royong Jumat Bersih di tiap kelurahan wajib digencarkan kembali. Penguatan kapasitas akar rumput juga terus diperluas. Hingga kini, Pemkot Bogor telah melantik puluhan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelana) serta mengukuhkan enam kecamatan sebagai Kecamatan Tangguh Bencana. **(her/*)**

HKN 2026, Akses Pelayanan Kesehatan di Pelosok Masih Jadi PR Kabupaten Bogor

maupun Provinsi dan pusat," ujarnya kepada wartawan.

Jaro menjelaskan, akses pelayanan kesehatan terhadap warga di pelosok daerah saat ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Bogor. "Jadi perhatian kita, terutama terhadap sarana dan prasarana infrastruktur kesehatannya. Jadi, keduanya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar pelayanan kepada masyarakat lebih dioptimalkan kembali," ucapnya.

Lebih lanjut, Ade berharap pelayanan kesehatan yang telah berjalan saat ini bisa terus dibenahi Dinkes Kabupaten Bogor segala kekurangan yang belum maksimal.

"Kita ingin memastikan betul-betul pelayanan baik dan sehat terhadap masyarakat, semoga bisa terus berkolaborasi dan terintegrasi antara rumah sakit Pemda dan swasta dengan rumah sakit yang difasilitasi Pak Gubernur," pungkasnya.

Sementara itu, Pemkab Bogor terus mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Pada 2027, Pemkab Bogor bakal merevitalisasi Puskesmas Cibening, Pamijahan.

Sedangkan, pada 2028 Pemkab Bogor berencana meningkatkan beberapa Puskesmas untuk dijadikan Poliklinik Rawat Inap. "Tahun 2027, proyek revitalisasi Puskesmas Cibening Pamijahan bakal direalisasikan dan masuk ke dalam proyek strategis daerah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty.

Secara paralel, pada 2027 itu pun rencana peningkatan beberapa Puskesmas untuk dijadikan Poliklinik Rawat Inap akan dibuatkan detail engineering design (DED). "Karena rencana upgrade beberapa Puskesmas untuk dijadikan Poliklinik Rawat Inap baru direncanakan di



akhir tahun ini, maka pada tahub 2027 baru kami buat DED-nya, lalu direalisasikan pada tahun berikutnya," terangnya.

Dia menjelaskan, terdapat kendala aturan dalam upgrade Puskesmas, terutama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga Pemkab Bogor tidak bisa banyak dalam membangun ruang rawat inap.

"Ada batasan dari BPJS Kesehatan, bahwa ruang rawat inap di Puskesmas atau Poliklinik Rawat Inap hanya 10 tempat tidur dan kalau ada pasien yang sangat butuh perawatan, maka bisa ditempatkan sementara di ruang IGD," jelasnya.

Selain itu, Puskesmas dan rumah sakit pun bakal mengoptimalkan telemedicine. "Dengan memanfaatkan telemedicine, maka pasien rawat inap Puskesmas yang tidak parah kondisinya, bisa berkonsultasi jarak jauh dengan dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit, hingga bisa mengatasi kondisi sakitnya," lanjut Fusia. **(cok/*)**

Yanyan Endian: Gibran Mundur Bukan ...

panggung politik hanyalah bagian dari rangkaian peristiwa yang terus berulang," ujar Yanyan Endian kepada Pelita Baru, Kamis, (12/11/2026).

Lebih lanjut Yanyan menyampaikan kekhawatiran masyarakat mengenai siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Ia menyebutkan ada dugaan bahwa calon pengganti yang muncul bisa saja memiliki reputasi buruk, meskipun tampak berpenampilan rapi dan meyakinkan di mata publik. Pernyataan ini disampaikannya sebagai catatan agar masyarakat tidak terlalu cepat bersukacita atas satu peristiwa politik saja.

"Dengan demikian, pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dipastikan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Bisa jadi situasi ke depan menjadi lebih baik, namun tidak tertutup kemungkinan justru menjadi sebaliknya," pungkasnya.

Yanyan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada dan mengawasi setiap proses pergantian tokoh politik ke depannya. **(Zie)**

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

HOTLINE: 0812-1161-3375 ***(Hunting)***
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

Bansos Banten Dikucurkan, Sachrudin Dorong Kemandirian Keluarga

Kota Tangerang, Pelita Baru

SEBANYAK 1.500 keluarga di Kota Tangerang mendapatkan alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Keluarga Provinsi Banten Tahun 2026.

Tak sekadar meringankan beban ekonomi, program ini diharapkan menjadi salah satu pijakan bagi keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian ekonomi.

Penyaluran tahap pertama berlangsung di Kantor Kecamatan Tangerang, Kamis (12/11/2026), melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang.

Dari total 16.311 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Provinsi Banten, Kota Tangerang memperoleh alokasi 1.500 KPM yang disalurkan dalam dua tahap, yakni 709 KPM pada November dan 791 KPM pada Desember 2026.

Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tina Andra Soni, hadir didampingi Wali Kota Tangerang H. Sachrudin dan Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono untuk menyapa langsung keluarga penerima manfaat.

Andra Soni menjelaskan, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8 miliar untuk program bantuan sosial tahun ini. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di Banten.

"Angka ini mungkin belum mencakup sebagian besar masyarakat yang membutuhkan. Namun, kami percaya bahwa dengan penyaluran kepada penerima yang tepat, bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi," ujar Andra Soni.

Ia menambahkan, Pemprov Banten juga telah mengusulkan penambahan jumlah penerima manfaat pada 2027 agar jangkauan perlindungan sosial semakin luas dan lebih banyak keluarga terbantu.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan berkelanjutan Pemprov Banten bagi masyarakat Kota Tangerang.

Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci agar perlindungan sosial dapat menjangkau warga yang membutuhkan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan.

"Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan keluarga saat ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemberdayaan usaha produktif dan akses pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah," ungkap Sachrudin.

Ia juga menekankan pentingnya ketepatan data dan penyaluran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.



"Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya meringankan beban kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi dorongan untuk semakin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi dan daerah, didukung ketepatan data serta penyaluran, harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang terbantu," tegas Sachrudin. **(nan)**

LP DI POLRES TANGSEL MANGKRAK SEJAK 2025

YNN & Partners: Sudah Lapor Kapolri Lewat WhatsApp, Mengapa Tetap Tak Ada Tindakan?



Kota Tangsel, Pelita Baru

KANTOR Firma Hukum YNN & Partners kembali melontarkan kritik pedas dan menohok kepada jajaran Polres Tangerang Selatan. Pasalnya, sebuah Laporan Polisi yang sudah resmi dilaporkan sejak tahun 2025 diduga mangkrak alias jalan di tempat, tanpa ada kejelasan dan kepastian hukum hingga hari ini.

"Buat apa lapor polisi kalau laporan didiamkan? Buat apa ada Propam dan Wasidik kalau pengaduan tidak digubris?" tegas Yanto Nelson Nalle, SH., MH. Ketua YNN & Partners kepada pewarta, Kamis (12/11/2026).

Laporan Sejak November 2025, Hingga Kini Tak Jelas Nasibnya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK-YNN/XI/2025 tanggal 13 November 2025, YNN & Partners bertindak untuk dan atas nama kliennya, RUDOLFUS RIWU LONY sebagai PELAPOR / PENGADU.

Kliennya melaporkan dugaan tindak pidana dengan Laporan Polisi Nomor: TBL/B/2678/X/2025/SPKT/Polres Tangerang Selatan/Polda Metro Jaya, tertanggal 13 November 2025.

Sudah satu tahun lebih berlalu, namun diduga belum ada perkembangan signifikan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak ada SP2HP yang jelas, tidak ada kepastian siapa tersangkanya, perkara diduga dibiarkan stagnasi. Ini bukan lagi lambat, ini sudah mangkrak!

Sudah Lapor Propam dan Wasidik, Tetap Didiamkan!

Tidak tinggal diam, YNN & Partners selaku Kuasa Hukum telah mengajukan PENGADUAN MASYARAKAT DAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN PROFESIONALITAS serta PERMOHONAN SUPERVISI / PENGAWASAN PENYIDIKAN* kepada Bidang Propam dan Wasidik Polda Metro Jaya.

Namun sangat disayangkan, pengaduan tersebut diduga juga tidak mendapat jawaban yang memadai dari Propam dan Wasidik Polda Metro Jaya.

"Bahwa pengaduan ini diajukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, Perpol No. 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," imbuh Nelson.

Artinya, semua prosedur hukum sudah ditempuh secara resmi dan sah, tapi tetap didiamkan.

SUDAH LAPOR LANGSUNG KE KAPOLRI VIA WHATSAPP, TETAP MANDUL!

Fakta paling mengejutkan dan memalukan, aduan ini sebelumnya sudah dilaporkan langsung ke Kapolri melalui pesan singkat WhatsApp-nya. Namun diduga, hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut belum juga mendapatkan tindak lanjut yang nyata di tingkat Polres Tangerang Selatan.

Jika sudah lapor ke Kapolri saja masih didiamkan, lantas masyarakat harus lapor kemana lagi? Harus viral dulu baru jalan?

YNN & Partners Desak Kapolres Tangsel & Kapolda Metro Jaya Turun Tangan

YNN & Partners memohon agar fungsi PROFESI DAN PENGAMANAN serta WASIDIK Polda Metro Jaya segera melakukan SUPERVISI untuk memastikan tidak terjadi stagnasi perkara tanpa alasan hukum dan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan harus dilakukan secara objektif, profesional dan proporsional demi terwujudnya kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

"Jika laporan masyarakat yang sudah setahun lebih saja dibiarkan mangkrak, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada polisi? Jangan sampai masyarakat berpikir, lapor polisi hanya buang-buang waktu dan biaya," tegas Nelson.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi dan hak jawab kepada Kapolres Tangerang Selatan, Bidang Propam dan Wasidik Polda Metro Jaya sesuai amanat Kode Etik Jurnalistik.

Hukum tidak boleh mandek. LP 2025 jangan sampai jadi arsip mati di 2026!. **(Cil)**

Kemenag Kab Gelar Do"a Bersama Untuk Kemaslahatan Bangsa

Kab Tangerang, Pelita Baru

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang menggelar Do'a bersama untuk Kemaslahatan Bangsa secara serentak pada Kamis, 12 November 2026. Untuk Kamemag Kabupaten Tangerang di gelar DI Aula Kamenag Kabupaten Tangerang dengan tagline Sejuta Doa untuk Negeri, kegiatan ini melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag, tokoh masyarakat, serta tokoh umat lintas agama se-Kabupaten Tangerang.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai bentuk kontribusi Kemenag dalam menguatkan persatuan, menjaga kedamaian, kerukunan, dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

“Doa bersama ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar Kementeian Agama dalam menguatkan persatuan, menjaga kerukunan, dan harmoni masyarakat agar proses berbangsa dan bernegara ini berjalan dengan baik,” ujar Kamenag Kabupaten Tangerang Akhmad Jubaedi yang di wakili Kasubag TU Kamenag Kabupaten Tangerang Moh. Iqro. S.Ag. M.Sy.

Menurutnya, Kemenag memiliki sumber daya dan jaringan kelembagaan yang luas hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa melalui para penyuluh. Karena itu, seluruh jajaran diharapkan berperan aktif mengonsolidasikan masyarakat untuk menjaga persatuan, kerukunan dan harmoni sosial.

"Kegiatan Do'a bersama ini di ikuti sebanyak 200 orang dari 6 Agama, Islam, Hindu, Budha, Kristen, Khatolok dan Khongchu dengan di gelarnya Do'a bersama ini kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tangerang akan terus terjalin," ucapnya.

Ia juga berharap kerukunan umat beragama di Kabupaten terus terjaga, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi aman. **(nan)**



Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa

Kab Tangerang, Pelita Baru

TIGA puluh hari berlalu begitu cepat, menyisakan jejak pengabdian yang terukir abadi di setiap sudut Desa Sumur Bandung. Tibalah hari penutupan program TMMD ke-130 pada Kamis, (12/11/2026), di mana jalan baru telah terbentang megah, air bersih mengalir jernih, rumah-rumah warga berdiri kokoh, dan wawasan masyarakat semakin tercerahkan.

Bagi para prajurit yang selama sebulan penuh tidur dan makan bersama warga, berpisah dengan masyarakat Desa Sumur Bandung bukanlah hal yang mudah. Ikatan batin yang terjalin di atas adukan semen, cangkul sawah, dan obrolan hangat di teras rumah telah menyatukan mereka layaknya saudara kandung.

Momen penutupan program TMMD ke-130 Kodim 0510/Tigaraksa ini menjadi penegasan bahwa pembangunan bangsa sejatinya berakar dari kekuatan desa-desa yang berdaya. Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat, setiap keterbatasan dapat diubah menjadi peluang kemajuan bersama.

"Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat dan sinergi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan wilayah pedesaan, karena TMMD bukan sekadar pembangunan fisik infrastruktur, melainkan sarana menumbuhkan semangat kebersamaan antara prajurit TNI dengan masyarakat desa," tegas Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya, Mayjen TNI Putra Widyawinaya, S.H., M.P.M. dalam amanat penutupan program TMMD ke-130.



Mengusung semangat "TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa", Kasdam Jaya menekankan bahwa TMMD bukan sekedar membangun tetapi sebagai upaya untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan Rakyat, Kami memberikan apresiasai yang sebesar besarnya kepada semua pihaj atas kerja sama semua pihak sehingga TMMD berjalan dengan baik.

Senja pun turun perlahan di langit Desa Sumur Bandung, memantulkan cahaya keemasan di atas jalan beton baru yang kini ramai dilalui langkah penuh harapan. Seragam loreng boleh saja kembali ke kesatuan.

Namun jejak kasih, keringat pengabdian, dan persaudaraan sejati di antara TNI dan rakyat akan terus hidup, mengalir jernih laksana air sumur yang tak pernah kering memberi kehidupan. **(nan)**

JAWA Barat

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

HOTLINE: 0813-1839-6433 ***(Hunting)***
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

EDISI 1868 **KAMIS,** 12 NOVEMBER 2026 - **HALAMAN 8**

Tata Ulang Drainase Jadi Solusi Mencegah Banjir

Bogor, Pelita Baru

MENGHADAPI ancaman banjir musiman akibat kontur geografis, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor terus menggenjot berbagai langkah mitigasi dan percepatan infrastruktur.

Wilayah RT 1/RW 1 diketahui menjadi titik yang paling sering menjadi langganan genangan air karena posisinya yang lebih rendah dibandingkan aliran sungai.

Lurah Pasir Kuda, Wildan Rayhan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan akselerasi perbaikan signifikan sejak rentang tahun 2024 hingga 2025.

"Karena dia itu kalau posisinya air lebih tinggi sedikit saja, karena posisi lahannya lebih rendah dari sungai, makanya dia gampang banjir. Tapi sudah kita lakukan banyak yang kita percepat akselerasi untuk perbaikan drainasenya, kemudian pemasangan TPT di sekitaran itu," ujar Wildan, Kamis (12/11/2026).

Selain pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), lanjut Wildan, pihak kelurahan juga menempuh langkah pencegahan jangka panjang melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Para Ketua RW setempat didorong untuk melakukan penataan ulang jalur air.

"Langkah ini bertujuan agar aliran air dari saluran-saluran alami tidak menumpuk di satu titik rendah saja, khususnya di area jembatan yang sempat mengalami banjir beberapa waktu lalu," tegasnya.

Menjawab isu mengenai status zona rawan bencana di wilayahnya, Wildan menegaskan bahwa Kelurahan Pasir Kuda tidak memiliki kawasan yang masuk dalam kategori zona hitam maupun zona merah.

"Kita nggak ada zona hitam, zona merah nggak ada. Kuning paling," kata Wildan.

Untuk wilayah yang masuk dalam kategori zona kuning tersebut, pihak kelurahan langsung bergerak dengan melakukan perbaikan infrastruktur yang mendesak. Fokus utama penanganan mencakup pembangunan TPT preventif serta pembenahan drainase di sejumlah titik yang sebelumnya tertutup atau bahkan belum memiliki saluran air.

Dari pendataan sebelumnya, tercatat ada sekitar enam titik rawan yang memerlukan perhatian khusus. Kendati demikian, penanganan di area-area tersebut kini sudah mulai direalisasikan. Pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir ini didukung melalui berbagai sumber pendanaan, baik yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) maupun anggaran reguler Dinas PUPR. **(hrs/*)**



Warga Luar Mendominasi Pelanggar Perda di Bandung

Bandung, Pelita Baru

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung mengungkap fakta mengejutkan di balik maraknya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sekitar 60 persen pelanggar yang terjaring razia penertiban bangunan dan aktivitas usaha ternyata merupakan warga pendatang dari luar Kota Bandung.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang, menyebut dominasi pelanggar luar daerah tersebut terlihat jelas saat petugas menyisir berbagai titik pelanggaran di lapangan.

"Asalnya bervariasi, tapi memang kebanyakan dari luar Bandung. Ya, ada di sekitar kisaran itu (60 persen)," ungkap Bambang, Kamis (12/11/2026).

Meski tidak merinci metode penghitungan pasti di balik angka tersebut, Bambang menegaskan indikasi terkuat terlihat dari identifikasi kendaraan para pelanggar yang didominasi pelat luar daerah.

Kendati didominasi pendatang, Bambang memastikan pihaknya tidak serta-merta melakukan penindakan represif. Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif agar para pedagang maupun pemilik bangunan memahami aturan tata ruang kota.

Ia juga menepis anggapan bahwa Pemkot Bandung menutup ruang bagi warga luar untuk mencari nafkah. Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap dipersilakan berjualan selama mematuhi Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Dalam regulasi tersebut, PKL dilarang keras mendirikan bangunan permanen maupun semipermanen, serta tidak boleh meninggalkan lapak atau barang dagangan selama 24 jam. Jam operasional berjualan pun dibatasi maksimal 12 jam. **(zie/*)**



Pemprov Jabar Wajibkan Material Lokal di Proyek APBD

Majalengka, Pelita Baru

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewajibkan seluruh proyek pembangunan rumah maupun infrastruktur yang dibiayai APBD menggunakan material bangunan lokal, mulai dari atap ijuk, genteng tanah liat, hingga batu bata.

Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan industri kerajinan lokal yang nyaris kolaps akibat gempuran material pabrikan asing.

Aturan tersebut akan diterapkan pada berbagai program daerah, termasuk bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan sekolah, kantor pemerintahan, hingga ornamen jalan dan jembatan.

"Kebijakan provinsi hari ini, rumah-rumah yang dibangun lewat dana provinsi menggunakan bambu dan ijuk untuk daerah pegunungan, sedangkan daerah panas menggunakan genteng," tegas Dedi dikutip Kamis (12/11/2026).

Selain atap tradisional, Pemprov Jabar juga mewajibkan penggunaan bata berbasis tanah liat pada seluruh proyek gedung sekolah, perkantoran, pagar, hingga gerbang jembatan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup para perajin bata lokal yang jumlahnya kian menyusut.

"Seluruh gerbang Pemprov Jabar dan gerbang jembatan semuanya dipasang bata berbasis tanah—ada yang dibiarkan bata merah alami, ada yang dicat putih agar indah. Ini akan langsung menggerakkan ekonomi lokal," ujarnya.

Dedi menyoroti bahwa industri genteng tradisional di Jawa Barat selama ini berada di ambang kebangkrutan. Produk perajin lokal kalah bersaing secara harga dengan genteng model luar negeri yang diproduksi secara masif di dalam negeri, sehingga membuat masyarakat enggan membeli genteng lokal.

Melalui intervensi belanja APBD dan Program Gentengisasi, Pemprov Jabar menargetkan serapan produksi perajin rakyat kembali melonjak sekaligus merawat karakter arsitektur khas daerah. **(adi/fuz/*)**

Korban Kebakaran Tolak Pengungsian yang Difasilitasi Pemerintah



Bandung, Pelita Baru

WARGA korban kebakaran di kawasan Pool Damri, Kota Bandung, memilih menolak fasilitas pengungsian yang disediakan pemerintah dan bertahan di posko mandiri yang didirikan secara swadaya.

Keputusan hasil musyawarah bersama pengurus lingkungan ini diambil demi menjaga ketenangan psikologis dan solidaritas antartetangga. Saat ini, para penyintas menempati musala, kantor RW, hingga menumpang di rumah kerabat yang selamat dari amukan api.

Ketua RW 10, Heri Suheri, mengungkapkan bahwa kondisi mental warga jauh lebih stabil sejak kembali ke lingkungan sendiri dibandingkan saat sempat dievakuasi ke area basement hotel yang membuat warga kebingungan dan tegang.

"Di sini mereka berada di wilayahnya sendiri, ada kami sebagai pengurus dan tetangga yang mendampingi. Ini murni keinginan warga agar pengungsian dipusatkan di musala dan kantor RW," ujar Heri, Kamis (12/11/2026).

Selain faktor kenyamanan, keengganan warga menempati posko pemerintah dipicu oleh kekhawatiran terhadap mekanisme pendataan dan aturan yang berpotensi memisahkan warga.

Salah seorang penyintas, Mila (45), mengaku warga sempat mendapat informasi soal pendataan berbasis kategori desil. Menurutnya, skema pengelompokan semacam itu justru berisiko memicu kecemburuan sosial di tengah situasi darurat.

"Kami bukan minta bantuan di posko mandiri yang didirikan secara swadaya. Kami butuh tempat perlindungan sementara untuk menenangkan diri. Di sini kami bisa tetap berkumpul, istilahnya makan tidak makan tetap bersama, tidak terpisah-pisah," tegas Mila.

Meski merasa lebih tenang di lingkungan sendiri, para penyintas mengaku kebutuhan mereka belum sepenuhnya tertangani. Di luar logistik sembako dan pakaian layak pakai, warga kini sangat membutuhkan bantuan dana tunai (cash).

Mila menuturkan, dukungan finansial menjadi krusial agar warga bisa segera bangkit memutar roda ekonomi mereka, mulai dari ongkos transportasi bagi pekerja hingga modal awal bagi warga yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran.

"Utamanya sekarang uang tunai untuk ongkos kerja dan modal usaha lagi. Kami harus memikirkan kelangsungan hidup ke depan, tidak bisa terus diam di posko menunggu bantuan," tandasnya. **(hrs/*)**

Pendampingan dan Pemberdayaan Jadi Kunci Putus Siklus PMKS

Kota Bogor, Pelita Baru

UPAYA penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bogor dinilai tidak akan pernah tuntas jika pemerintah daerah hanya mengandalkan pola razia dan penertiban di jalanan.

Tanpa menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi yang membelit para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tersebut, langkah penertiban hanya akan memicu siklus berulang yang membuat mereka terus kembali ke jalan.

Penggiat sosial kemasyarakatan Kota Bogor, Dadang Senjaya, menegaskan bahwa pendekatan jangka panjang melalui skema pendampingan, pembinaan mental, hingga pemberdayaan ekonomi harus menjadi tulang punggung kebijakan pemerintah.

Menurutnya, setiap individu PMKS memiliki latar belakang kerentanan yang berbeda, sehingga penanganannya pun menuntut pemetaan masalah secara spesifik dan humanis.

“Penertiban saja tidak cukup. Mereka membutuhkan pendampingan komprehensif untuk menyelesaikan akar persoalan yang selama ini membuat mereka terpaksa kembali ke jalan,” ujar Dadang, Kamis (12/11/2026).

Untuk memutus mata rantai kerentanan tersebut, Dadang mendorong Pemerintah Kota Bogor memperkuat akurasi basis data serta menghadirkan pendampingan berkelanjutan yang melibatkan lingkar terdekat PMKS, yakni keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Penyaluran program bantuan sosial pun didesak agar tidak berhenti pada bantuan karitatif semata, melainkan terintegrasi langsung dengan program pembinaan keterampilan agar menciptakan dampak kemandirian jangka panjang.

Lebih jauh, ia menyoroti persoalan klasik yang kerap membuat warga rentan terpinggirkan dari jaring pengaman sosial, yakni kendala administrasi kependudukan maupun ketiadaan dokumen keluarga.

Dadang menilai hambatan birokrasi semacam itu tidak boleh menjadi tembok penghalang bagi PMKS untuk mengakses program pemulihan dan perlindungan dari pemerintah.

Di sisi lain, keberhasilan penanganan PMKS juga sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat luas. Dadang mengajak warga Kota Bogor untuk menghentikan stigma negatif maupun sikap menghakimi terhadap para penyandang masalah sosial, dan mulai berperan aktif mengarahkan mereka ke saluran pendampingan resmi yang tersedia.

Ia juga menyoroti kebiasaan sebagian warga yang masih gemar memberikan uang secara langsung di persimpangan jalan. Meski dilandasi niat baik, pemberian uang tunai di jalanan dinilai justru melanggengkan ketergantungan dan membuat PMKS enggan keluar dari zona nyaman.



Sebagai gantinya, lanjut Dadang, masyarakat didorong menyalurkan kepedulian melalui dukungan yang jauh lebih produktif, seperti membuka akses pelatihan keterampilan, peluang kerja, maupun sokongan permodalan usaha mikro.

“Bantuan yang jauh lebih tepat dan bermartabat adalah memberikan jalan bagi mereka untuk berubah, sehingga kelak mereka mampu bangkit dan hidup lebih mandiri,” pungkas Dadang. **(her)**

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

HOTLINE: 0812-1161-3375 ***(Hunting)***
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

BEKASI Raya

JUMAT, 13 NOVEMBER 2026 - **HALAMAN 9** **EDISI 1869**

Wawali Bekasi Dukung Kemajuan Olahraga Disabilitas

Bandung, Pelita Baru

SEBAGAI bentuk komitmen dalam mendukung kemajuan olahraga disabilitas, sekaligus memastikan kesiapan kontingen Kota Bekasi menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi Jabar.

Wakil Wali (Wawali) Bekasi, hadiri kegiatan Chief de Mission (CDM) Meeting Pekan Paralimpik Daerah (Peperda) ke VII Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Ultima Horison, Kota Bandung, Kamis (12/11/2026).

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe pada kesempatan itu, mengungkapkan, keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kemajuan olahraga disabilitas.

"Peperda bukan sekadar ajang kompetisi untuk meraih prestasi dan medali, tetapi juga menjadi ruang bagi para atlet penyandang disabilitas menunjukkan kemampuan, semangat, serta potensi terbaik yang mereka miliki. Pemerintah Kota Bekasi tentu memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan para atlet," ujar Abdul Harris Bobihoe.

Ditegaskan, para atlet disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengharumkan nama daerah, melalui bidang olahraga. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, pelatih, pengurus organisasi olahraga, serta seluruh pihak terkait sangat diperlukan.



Wakil Wali (Wawali) Bekasi, Abdul Harris Bobihoe saat menghadiri kegiatan Chief de Mission (CDM) Meeting Pekan Paralimpik Daerah (Peperda) ke VII Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Ultima Horison, Kota Bandung, Kamis (12/11/2026). (Anes Prabowo | Pelita Baru)

"Semangat dan perjuangan para atlet harus menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan pernah melihat keterbatasan sebagai penghalang untuk berprestasi. Kami berharap kontingen Kota Bekasi dapat mempersiapkan diri dengan maksimal, menjaga kekompakan, dan memberikan hasil terbaik pada PeperdaVII Jawa Barat 2026," katanya.

Menurut Harris Bobihoe, melalui kegiatan CDM Meeting ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap seluruh informasi dan persiapan penyelenggaraan dapat dikoordinasikan dengan baik, sehingga kontingen dapat mengikuti setiap tahapan pertandingan secara optimal.

Dengan persiapan yang matang, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kota Bekasi optimistis dapat berpartisipasi secara maksimal dalam Peperda VII, Jawa Barat Tahun 2026. Sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet disabilitas berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah.

Kegiatan CDM Meeting Peperda ke VII Jawa Barat Tahun 2026 ini diikuti unsur pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat, perwakilan DPRD kabupaten/kota, unsur kontingen seluruh daerah se Jabar, organisasi olahraga, serta Panitia Besar Peperda VII Jawa Barat. **(ans)**

Terdampak Proyek Japek II, Ini Solusi dari Bupati Bekasi untuk SDN Burangkeng 03



Bekasi, Pelita Baru

BUPATI Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau langsung kondisi SDN Burangkeng 03 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, yang terdampak pembangunan proyek Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II, pada Kamis (12/11/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan para siswa dan tenaga pendidik selama proses pembangunan berlangsung, sekaligus mencari solusi terbaik terkait pemindahan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) serta pembangunan gedung sekolah pengganti.

Bupati Asep mengatakan, sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keberatan terkait rencana pemindahan sementara kegiatan belajar mengajar ke SDN Burangkeng 05. Warga khawatir lokasi sekolah pengganti terlalu jauh dan dapat mengganggu aktivitas belajar para siswa.

"Saya sudah bicara dengan para orangtua murid agar untuk sementara kegiatan belajar mengajar dipindahkan, dan Alhamdulillah akhirnya mereka setuju, karena kalau dipaksakan jaraknya terlalu dekat dengan proyek Japek II," ujarnya.

Asep menjelaskan, lokasi sekolah saat ini cukup dekat dengan aktivitas pembangunan proyek tol sehingga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi siswa.

Setelah dilakukan komunikasi dan penjelasan kepada para orang tua, akhirnya disepakati bahwa kegiatan belajar mengajar dipindahkan sementara ke SDN Burangkeng 05.

Dirinya juga telah meninjau langsung fasilitas di sekolah sementara tersebut untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik meskipun menggunakan fasilitas sekolah lain.

Selain memastikan proses pemindahan KBM sementara, Bupati juga meninjau lokasi yang dipersiapkan sebagai tempat pembangunan gedung baru SDN Burangkeng 03. Ia menyebutkan, masyarakat telah menyetujui lokasi tersebut dan saat ini tinggal menyelesaikan proses administrasi serta koordinasi dengan pihak terkait.

"Untuk lokasi pembangunan sekolah yang baru, masyarakat sudah setuju. Sekarang tinggal penyelesaian administrasi dan koordinasi dengan pihak Japek II serta pemerintah daerah. Saya ingin semuanya bisa segera diselesaikan agar pembangunan sekolah pengganti dapat segera dilaksanakan," ungkapnya.

Asep berharap melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pihak pelaksana proyek, dan masyarakat, pembangunan sekolah pengganti dapat segera direalisasikan sehingga para siswa nantinya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih aman dan nyaman.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memastikan dampak pembangunan infrastruktur tidak menghambat hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan serta menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar selama proses pembangunan berlangsung.

(ans/*)

BUMDES Sukaraya Hasilkan 93 Kg Telur Ayam Setiap Hari

Bekasi, Pelita Baru

BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, mampu menghasilkan rata-rata 93 kilogram telur ayam setiap hari melalui usaha peternakan ayam petelur.

Usaha yang mulai dibangun pada 2025 ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Desa Sukaraya dalam memperkuat program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Direktur BUMDes Mandiri Sukaraya, Miswanto, mengatakan peternakan ayam petelur tersebut dibangun di atas Tanah Kas Desa (TKD) dengan populasi awal sebanyak 2.000 ekor ayam.

"Jadi dari 2.000 ekor ayam tersebut, produksi telur rata-rata mencapai 93 kilogram per hari atau sekitar 651 kilogram dalam satu minggu," ujar Miswanto pada Kamis, (12/11/2026).

Miswanto menjelaskan, pengembangan ternak ayam tersebut tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga untuk membantu memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Selain itu, keberadaan peternakan diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan nasional dan upaya penurunan stunting.

"Dengan jumlah produksi ini, kami berharap bisa membantu kebutuhan protein hewani warga khususnya Desa Sukaraya, mendukung program ketahanan pangan nasional, program penurunan stunting serta bisa menjadi salah satu usaha milik desa yang bisa menghasilkan pendapatan asli Desa Sukaraya," jelasnya.

Miswanto menambahkan, keberadaan peternakan ayam petelur turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Saat ini, BUMDes Mandiri Sukaraya sudah mempekerjakan 5 orang tenaga kerja lokal untuk mendukung operasional usaha tersebut.

Dalam memasarkan hasil produksinya, BUMDes Mandiri Sukaraya menjalin kerja sama dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terutama untuk mendukung kebutuhan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk sementara, kami sudah bekerja sama dengan SPPG Desa Sukaraya dan SPPG Karangsetia 2. Kerja sama ini menjadi salah satu jalur pemasaran hasil produksi telur kami," jelasnya.

Selain memasok kebutuhan SPPG, lanjut Miswanto, BUMDes juga melayani pembelian telur secara langsung dengan datang ke kandang, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun keperluan usaha masyarakat. Selan itu, BUMDes juga melayani penjualan telur melalui kegiatan bazar UMKM dan pasar pagi di Desa Sukaraya.

"Kami juga melayani penjualan telur dengan cara mendatangi warga desa dengan partisipasi dalam bazar UMKM ataupun pasar-pasar pagi yang ada di Desa Sukaraya," ungkapnya.

Tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, Miswanto menambahkan, BUMDes Mandiri Sukaraya pun berupaya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial kepada warga kurang mampu.



Sementara itu, apresiasi terhadap kerja sama tersebut disampaikan Pengurus SPPG Karangsetia 2, Syaroni. Ia menilai telur yang dipasok BUMDes Mandiri Sukaraya memiliki kualitas yang bagus dan fresh.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama suplai telur dari BUMDes Mandiri Sukaraya. Kualitas telurnya baik, premium, dan sangat fresh karena baru keluar dari kandang," ungkapnya.

Hal senada disampaikan salah seorang warga Desa Sukaraya, Ibu Gofar mengaku sangat terbantu dengan keberadaan peternakan ayam petelur BUMDes Mandiri Sukaraya karena masyarakat setempat bisa memperoleh telur berkualitas dengan kondisi yang masih segar langsung dari kandang.

"Alhamdulillah dengan adanya peternakan ayam petelur ini, kami sebagai warga sekitar sangat terbantu. Kami bisa mendapatkan telur dengan kualitas bagus, dijamin segar dan terbaik," tuturnya. **(ans/*)**

Sekda Kota Bekasi Minta Kepala Dinas Harus Visioner

Bekasi, Pelita Baru

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menghadiri kegiatan Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Rabu (11/11/2026), bertempat di Balai Diklat BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Solikhin berperan sebagai mentor bagi sejumlah kepala perangkat daerah yaitu Sumpono Brama (Disdamkarmat), Anjar Budiono (BKPSDM Kota Bekasi), Idi Susanto (DBMSDA), Priadi Santoso (DPMPTSP), Ridwan AS (DPPPA) mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026.

Peran mentor menjadi bagian penting dalam memberikan arahan, pendampingan, serta penguatan terhadap gagasan dan implementasi proyek perubahan yang disusun oleh para peserta.

Seminar ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, yang diikuti oleh 60 peserta dari berbagai instansi. Kegiatan tersebut mengusung tema "Peran Kepemimpinan Adaptif dan Kolaboratif dalam Penguatan Tata Kelola Mitigasi Kerusakan Lingkungan".

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mempresentasikan hasil implementasi proyek perubahan yang telah dirancang selama mengikuti pelatihan, sekaligus memperoleh masukan dan penguatan dari mentor serta para penguji agar inovasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kerja masing-masing.

Sekda Kota Bekasi Muhammad Solikhin menyampaikan bahwa peran mentor bukan hanya memberikan pendampingan selama proses pelatihan, tetapi juga memastikan gagasan perubahan yang dirancang para peserta dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

"Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, membangun kolaborasi, serta berani menghadirkan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan" ucap Solikhin

Menurutnya, proyek perubahan yang dihasilkan melalui PKN Tingkat II hendaknya tidak berhenti sebatas pemenuhan tahapan pendidikan dan pelatihan, melainkan harus menjadi langkah konkret dalam mendorong transformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur sipil negara, khususnya para pejabat pimpinan tinggi pratama, agar mampu menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Melalui keikutsertaan dan pendampingan dalam PKN Tingkat II ini, diharapkan lahir berbagai terobosan serta inovasi yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan dan kemajuan Kota Bekasi. **(ans/*)**



Wali Kota Bekasi Sapa Veteran Ajudan Istri Presiden Soekarno

Bekasi, Pelita Baru

USAI pelaksanaan Upacara Hari Pahlawan dan Tabur bunga di TMP Bulak Kapal, Momen hangat terjadi saat Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyapa dan berbincang langsung dengan para Veteran Republik Indonesia dalam kegiatan ramah tamah memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), di Aula Nonon Sonthanie.

Di antara para veteran yang hadir, terdapat sosok veteran perempuan bernama Dien Mardiah Polla. Perempuan kelahiran 1939 tersebut memiliki kisah pengabdian yang menarik. Ia diketahui pernah menjadi ajudan Ibu Hartini, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Di usianya yang telah menginjak 87 tahun, Dien Mardiah Polla masih dalam keadaan sehat dan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Dalam kesempatan tersebut, Tri Adhianto menyapa langsung Dien Mardiah Polla. Pertemuan ini menjadi momen penuh makna, sekaligus bentuk penghormatan kepada sosok veteran perempuan yang memiliki pengalaman dalam perjalanan sejarah bangsa.

Tri Adhianto menyampaikan bahwa para veteran merupakan saksi sekaligus bagian penting dari perjuangan bangsa Indonesia. Pengorbanan dan pengabdian mereka menjadi warisan berharga yang harus terus dihormati dan dikenang oleh generasi penerus.

"Kami ingin terus menjaga silaturahmi dengan para veteran. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi generasi muda. Jasa dan pengorbanan mereka tidak boleh kita lupakan," ungkapnya.

Melalui kegiatan ramah tamah ini, Pemerintah Kota Bekasi ingin mempererat silaturahmi dengan para veteran sekaligus memberikan penghargaan atas jasa dan perjuangan mereka.

"Para veteran adalah saksi sejarah yang memiliki pengalaman dan pengorbanan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bertemu langsung dengan sosok seperti Ibu Dien Mardiah Polla menjadi pengingat bagi kita bahwa perjuangan bangsa memiliki banyak cerita yang patut dihargai dan dikenang. Semangat pengabdian beliau harus menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus mencintai dan membangun bangsa," ujar Tri Adhianto.

Momentum Hari Pahlawan juga menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan harus terus dilanjutkan melalui pengabdian, persatuan, dan kontribusi nyata dalam membangun Kota Bekasi.

(ans/*)

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA
HOTLINE: 0812-1161-3375 *(Hunting)*
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/

- SENTUL CITY CUP 2026 -

Pererat Silaturahmi dan Kemitraan dengan Insan Pers

Sentul, Pelita Baru



PT Sentul City Tbk menggelar perlombaan Turnamen Biliar Sentul City Cup 2026 bersama insan pers yang tergabung dalam Komunitas Forum Pemred (Pimpinan Redaksi) Bogor.

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat tali silaturahmi dan membangun kedekatan langsung dengan insan pers. Kegiatan tersebut berlangsung di Spin Master, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada Kamis (12/11/2026).

Perwakilan Manajemen PT Sentul City Tbk Budi Purwanto mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk silaturahmi antara Sentul City dengan para pimpinan media di wilayah Bogor Raya.

"Kami ucapkan terima kasih sudah mau hadir di Sentul City. Kami memang mempunyai keinginan melalui program ini untuk semakin dekat dengan insan pers, sekaligus memberikan informasi seputar Sentul City," ujar Budi dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk berdiskusi. Ia menyebutkan, pihaknya terbuka untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan media serta menerima berbagai masukan, arahan, kritik, dan saran.

"Kami ingin semakin dekat. Apabila nanti ada waktu untuk tanya jawab atau berita tentang Sentul, kami bersedia memberikan informasi seluas-luasnya. Kami juga menerima masukan dan arahan dari semua pihak untuk mengembangkan Sentul ini sebagai kota mandiri yang akan terus berkembang," jelasnya.

Menurutnya, perkembangan sebuah kawasan perkotaan tentu memiliki berbagai tantangan serta dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, PT Sentul City terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif, baik kepada para pegawai, masyarakat, maupun insan pers.

"Perkembangan kota itu pasti ada dampak positif dan negatif. Pada intinya, kami tentu memiliki keinginan agar dampak tersebut menjadi positif melalui masukan dan saran untuk kebaikan masyarakat maupun perusahaan sendiri," ujarnya.

"Pada kesempatan ini, kami sangat berterima kasih. Kami terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik. Kami menerima itu semua. Kira-kira apa yang bisa didiskusikan, silakan disampaikan sehingga kami bisa menumbuhkan hal-hal yang positif," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pemred Bogor Raya Diki mengatakan, insan pers bukan hanya bertugas memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, media juga merupakan mitra strategis yang dapat membantu mengedukasi masyarakat.

"Saya tegaskan bahwa media ini bukan hanya mitra, tetapi mitra strategis. Kami bukan hanya memberikan sebuah informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap, pertemuan dan diskusi seperti ini dapat terus berlanjut. Dengan begitu, insan pers dapat berperan dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait PT Sentul City Tbk. "Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya hari ini, tetapi bisa berkelanjutan," tandasnya. **(adi/*)**

Kontingen Kota Bogor Makin Dekat ke Target 100 Emas



Kota Bogor, Pelita Baru

KONTINGEN Kota Bogor tancap gas di ajang Porprov XV Jawa Barat 2026. Memasuki hari kedelapan, daerah berjuluk "Kota Hujan" ini sukses mengoleksi 54 medali emas atau melampaui separuh jalan dari target 100 medali emas. Capaian ini menempatkan Kota Bogor di peringkat keempat klasemen sementara dengan total raihan sekitar 125 medali.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana, menyebut laju perolehan medali ini bahkan melampaui proyeksi sport science yang telah disusun sebelumnya. "Kami tidak menyangka di hari kedelapan sudah meraih lebih dari 50 persen target. Tadi baru saja nomor Aero-Aerobik menyumbang emas ke-56. Ini on progress dengan slogan kami, 'Bogor 100'," ujar Anas, Kamis (12/11/2026)

Menurut Anas, target 100 emas bukan sekadar mengejar posisi klasemen, melainkan pembuktian lompatan prestasi dibandingkan Porprov 2022 yang mencatatkan 75 emas. "Dengan sisa waktu pertandingan hingga 19 November mendatang, kami yakin posisi Kota Bogor akan terus merangkak naik ke lima besar atau bertahan di empat besar," tegas Anas.

Sejumlah cabang olahraga tampil melampaui ekspektasi. Judo menjadi lumbung emas utama dengan torehan 12 emas (melampaui target 10 emas), disusul menembak (9 emas), kurash (6 emas), dan shorinji kempo (5 emas dari target 4). Sementara itu, angkat besi, anggar, dan balap sepeda masing-masing menyumbangkan 3 emas.

Tak hanya dominan di nomor perorangan, Porprov kali ini juga menjadi panggung sejarah bagi olahraga beregu Kota Bogor. Untuk pertama kalinya, tim bola basket berhasil menembus partai final dan membawa pulang medali perak.

"Sejarah baru juga diukir cabor sepatu roda dan bridge yang sukses mempersembahkan emas perdana sepanjang keikutsertaan Kota Bogor di ajang Porprov," terang Anas.

Dalam kesempatan yang sama, Dispora juga memastikan polemik yang sempat menunda pertandingan cabor tenis meja selama dua hari telah berakhir. Persoalan bermula saat salah satu atlet Kota Bogor, Taufik, terkendala penerbitan kartu identitas karena belum mengantongi SK Keabsahan dari PTMSI Jawa Barat, meski namanya telah lolos saat Delegation Registration Meeting (DRM).

Setelah berkoordinasi dengan PB PTMSI, Pengprov PTMSI Jabar, Panwasrah, dan KONI Jabar, Kota Bogor memilih legawa mengikuti regulasi demi kelancaran kompetisi daerah lain..

"Pertandingan sudah kembali berjalan. Kami tetap optimistis bisa mencuri emas dari nomor tunggal putri dan beregu putri," tandasnya.

Sementara, Kepala Kabid Prestasi Olahraga Dispora Kota Bogor sekaligus tim Pusdatin, Hotlan, mengungkapkan adanya perbedaan pencatatan antara data internal dan KONI Jawa Barat. "Data riil Pusdatin per detik ini sudah 56 emas, sedangkan di sistem KONI Jabar masih tercatat 50 emas. Kami terus menyandingkan data lapangan dengan sistem DRMS agar sinkron," jelas Hotlan. **(her/*)**

Menpora Protes Penghapusan Cabor Olimpiade SEA Games 2027

Jakarta, Pelita Baru

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, melontarkan kritik pedas atas keputusan Malaysia mencoret sejumlah cabang olahraga (cabor) Olimpiade dari daftar pertandingan SEA Games 2027.

Kebijakan tuan rumah tersebut dinilai mencederai semangat sportivitas sekaligus mengkhianati perjuangan para atlet Asia Tenggara yang telah berjaya di panggung dunia.

Erick menyayangkan langkah pemangkasan cabor prestisius di saat negara-negara ASEAN justru tengah menunjukkan taringnya di level Olimpiade. Ia menyoroti deretan peraih emas Olimpiade dari kawasan ini, mulai dari pesenam Filipina Carlos Yulo, atlet taekwondo Thailand, petembak Vietnam, hingga lifter Rizky Juniansyah dan atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo.

"Menyedihkan. Kalau cabang-cabang Olimpiade ini tidak dipertandingkan, sama saja kita mengkhianati perjuangan para atlet yang sudah mengibarkan bendera negaranya di level dunia," tegas Erick, Kamis (12/11/2026).

Pada SEA Games edisi ke-34 di Malaysia mendatang, panitia penyelenggara hanya mempertandingkan 473 nomor dari 43 cabor atau menyusut drastis dibandingkan SEA Games Thailand 2025 yang melombakan 573 nomor dari 50 cabor.

Sejumlah cabor Olimpiade yang selama ini menjadi lumbung emas Indonesia ikut terdepak, di antaranya panjat tebing, dayung, voli pantai, hingga bulu tangkis nomor beregu.

Merespons pemangkasan tersebut, Erick memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Kemenpora bersama Komite Olimpiade Indonesia (NOC) mulai menggerakkan langkah sport diplomacy dan menggalang dukungan dari menteri olahraga negara-negara tetangga yang memiliki keresahan serupa.

Sebagai langkah awal, Erick mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Olahraga Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, guna meminta klarifikasi sekaligus mempertanyakan komitmen tuan rumah terhadap prinsip keadilan (fairness).

"Saya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Olahraga Malaysia untuk meminta penjelasan dan komitmen, apakah kita sebagai negara Asia Tenggara masih saling menghormati yang namanya fairness dan sportivitas?" pungkas Erick. **(fuz/*)**

Porprov Jabar, Siswi SMA 3 Bogor Sabet Emas

Bogor, Pelita Baru

ATLET muda asal Kota Bogor, Hera Chaerunia Ningsih (16), sukses mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga (cabor) Kurash pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Siswi SMA Negeri 3 Kota Bogor ini memastikan podium tertinggi usai menumbangkan wakil Kabupaten Bekasi dalam laga final sengit di GOR B Pajajaran, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, pada Rabu 11 November 2026.

Kemenangan Hera diraih lewat drama kejar-kejaran poin. Ia mengaku sempat dilanda rasa gugup sebelum laga dimulai, situasi yang kian menekan saat perolehan angkanya tertinggal lebih dulu dari lawan. Namun, mentalitas bertanding yang kuat membuatnya mampu membalikkan keadaan hingga peluit akhir berbunyi.

"Sebelum pertandingan di babak final sempat deg-degan, karena tadi juga sempat tertinggal poin. Tapi alhamdulillah bisa mengejar," ujar Hera.

Medali emas ini menjadi pembuktian manis bagi Hera yang terhitung baru menggeluti cabor Kurash selama lebih dari setahun terakhir. Sebelum beralih ke seni bela diri asal Uzbekistan tersebut, ia sudah lebih dulu menempa diri di cabor Judo sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar (SD).

Demi menaklukkan panggung Porprov, Hera melahap porsi latihan ekstra keras. Selama lebih dari satu tahun persiapan, ia rutin berlatih dua kali sehari pada pagi dan siang hari, lalu meningkatkannya menjadi tiga sesi (pagi, siang, dan sore) menjelang hari pertandingan.

"Alhamdulillah senang banget. Perjuangan selama satu tahun lebih untuk meraih emas di Porprov ini tidak terbuang sia-sia. Ini juga hasil dari dukungan penuh orang tua dan pelatih," pungkasnya.

(her/*)

- PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT 2026 -

Mendulang 98 Medali Emas, Kota Bekasi Kokoh di Puncak Klasemen

Bekasi, Pelita Baru

KONTINGEN tuan rumah Kota Bekasi semakin menunjukkan tajinya pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Hingga memasuki hari ke-15 rangkaian pertandingan pada Kamis (12/11/2026) pukul 15.00 WIB, Kota Patriot kian kokoh bertengger di puncak klasemen sementara dengan koleksi 98 medali emas, memperlebar jarak secara signifikan dari para rival terdekatnya.

Berdasarkan pembaruan data resmi panitia pertandingan, Kontingen Kota Bekasi memimpin klasemen dengan total perolehan 234 keping medali, yang terdiri atas 98 emas, 65 perak, dan 71 perunggu.

Dominasi merata para atlet di berbagai nomor perlombaan menjadi kunci utama melesatnya perolehan poin tuan rumah, sekaligus membuka jalan lebar menuju target meraih gelar juara umum.

Keunggulan telak Kota Bekasi di posisi teratas kontras dengan pertarungan sengit yang terjadi di papan tengah atas untuk memperebutkan posisi runner-up. Kontingen Kota Bandung saat ini menduduki peringkat kedua dengan torehan 63 medali emas, 62 perak, dan 77 perunggu (total 202 medali).

Namun, posisi Kota Kembang jauh dari kata aman karena Kabupaten Bekasi terus membayangi di urutan ketiga dengan selisih sangat tipis. Kabupaten Bekasi telah mengamankan 62 medali emas, 50 perak, dan 59 perunggu (total 171 medali), membuat selisih kedua daerah ini hanya terpaut satu medali emas.

Tingginya intensitas perolehan medali pada pertengahan pekan ini dipicu oleh padatnya jadwal final di puluhan arena. Tercatat, sebanyak 329 dari 346 laga yang dijadwalkan pada hari ini telah rampung digelar di 36 venue berbeda.

Sejumlah cabang olahraga (cabor) bergengsi turut menyumbang kepingan medali, mulai dari Aeromodelling, Akuatik, Anggar, Arung Jeram, Atletik, Balap Motor, hingga Balap Sepeda.

Secara akumulatif hingga Kamis sore, panitia telah menuntaskan 417 dari total 1.156 nomor pertandingan yang dipertandingkan dalam pesta olahraga empat tahunan ini. Sebanyak 445 medali emas, 445 perak, dan 621 perunggu pun telah resmi terdistribusi kepada kontingen dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Dengan masih tersisanya ratusan nomor perlombaan serta belasan laga penutup hari ini hingga upacara penutupan pada 20 November 2026 mendatang, peta perolehan medali dipastikan masih akan bergerak sangat dinamis.

Sembilan hari ke depan akan menjadi fase krusial bagi Kota Bekasi untuk menjaga konsistensi performa



demi mengunci gelar juara umum di kandang sendiri.

Capaian impresif kontingen tuan rumah ini turut mendapat apresiasi tinggi dari jajaran legislatif. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasinya atas kerja keras para atlet, pelatih, dan ofisial yang berhasil membawa Kota Bekasi memuncaki klasemen sementara.

Wildan berpesan agar euforia keunggulan saat ini tidak membuat para atlet lengah menghadapi sisa pertandingan yang masih panjang dan penuh tantangan. “Terus berjuang, jaga sportivitas, dan buktikan bahwa Kota Bekasi memiliki potensi besar menjadi salah satu barometer prestasi olahraga di Jawa Barat,” tegas Wildan, Kamis (12/11/2026). **(nan)**

HARIAN UMUM
Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

HOTLINE: 0813-1839-6433 ***(Hunting)***
Email: redaksipelitabaru@gmail.com/
sirkulasipelitabaru@gmail.com/
iklanpelitabaru@gmail.com/



Prabowo Berat Hati Menerima Surat Berhenti Gibran

beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.

Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan dirinya memberikan tugas kepada Wapres Gibran untuk banyak turun langsung ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah. Dalam dua tahun, Wapres Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta melakukan pengecekan dan peninjauan di 303 titik proyek pemerintah.

"Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Wapres Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan tersebut. Presiden turut menyampaikan dukungan kepada Gibran dan keluarganya serta meyakini bahwa Gibran masih memiliki perjalanan pengabdian yang panjang ke depan.

Menutup keterangannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana tetap sejuk dan damai.

"Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan," pungkas Presiden.

Sebelumnya, residen Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (12/11/2026).

Setibanya di Istana Merdeka, Wakil Presiden Gibran disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Selanjutnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melaksanakan pertemuan, duduk bersama di salah satu ruang Istana Merdeka.

Usai pertemuan, Presiden mengantarkan Wakil Presiden menuju kendaraannya. Keduanya kemudian melanjutkan agenda masing-masing. **(fuz)**

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Harus ...

oroti konsekuensi pemisahan pemilu nasional dan lokal, termasuk skema transisi masa jabatan anggota DPRD serta pengisian jabatan kepala daerah.

Taufan menjelaskan, jika mengikuti skema pemisahan tersebut, maka menurutnya, Pemilu nasional direncanakan berlangsung pada 2029, sedangkan pemilu lokal dilaksanakan pada 2031.

Namun demikian, jeda waktu ini memunculkan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai keberlanjutan masa jabatan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang telah terpilih melalui pemilu sebelumnya.

Ia mempertanyakan apakah masa jabatan anggota DPRD perlu diperpanjang hingga pelaksanaan pemilu lokal berikutnya atau diperlukan mekanisme pemilu transisi untuk mengisi jeda tersebut. Menurutnya, setiap pilihan harus dikaji secara serius, termasuk dari sisi efisiensi anggaran dan kepastian hukum.

"Kalau kita berbicara mengenai teori transisi, apakah anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota itu diperpanjang? Mereka sudah dipilih. Namun, dasar untuk memperpanjang masa jabatan anggota DPRD dari semua tingkatan tentu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara serius dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu," ujar Taufan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menyoroti kemungkinan penyerahan pengaturan masa transisi kepada partai politik, termasuk terkait pergantian anggota legislatif setelah masa jabatan lima tahun berakhir. Namun, menurutnya, pilihan tersebut juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan sistem kepemiluan.

Selain masa jabatan legislatif daerah, Taufan mengingatkan persoalan pengisian penjabat kepala daerah selama masa transisi. Ia menilai, mekanisme penunjukan penjabat oleh pemerintah perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu independensi dan kualitas proses demokrasi.

Karena itu, ia meminta para akademisi tidak berhenti pada gagasan rekonstruksi sistem pemilu secara umum, tetapi memberikan rekomendasi yang lebih terperinci dan dapat diterjemahkan ke dalam norma undang-undang.

"Kita jangan hanya melempar bahwa rekonstruksi hukumnya itu untuk sistem kepemiluan, tetapi harus dikonkretkan. Seperti apa yang dimaksudkan, sehingga kami dapat menerjemahkannya secara akademis, faktual, dan empiris," tegasnya.

Taufan menambahkan, penyusunan RUU Pemilu harus tetap berpedoman pada perspektif negara hukum dan konstitusional. Seluruh norma yang dirumuskan harus konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi.

"Perspektif negara hukum dan konstitusional betul-betul memastikan seluruh norma pemilu konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini patron kita yang tidak boleh diabaikan," pungkas legislator dari dapil Sulawesi Selatan II itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai penyusunan RUU tentang Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2029 perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi elektoral.

Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya menyentuh desain teknis pemilu, tetapi juga harus memperhatikan peran partai politik, penyelenggara pemilu, hingga partisipasi masyarakat.

Agun menyoroti fungsi partai politik yang dinilainya masih cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral atau sekadar memperoleh kursi dalam pemilu. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada belum optimalnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

"Metode rekrutmen, fungsi kepartaian tidak berjalan efektif. Tinggal rekrutmen yang terjadi itu lebih kepada hasil survei, atau yang memiliki kemampuan keuangan cukup kuat, atau memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia juga menilai penguatan partai politik perlu disertai tata kelola yang akuntabel dan profesional. Untuk itu, Agun meminta para pakar perguruan tinggi memberikan kajian mengenai skema pembiayaan partai politik yang memadai, terukur, serta dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, terdapat ketimpangan yang perlu dikaji antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilu dengan dukungan pembiayaan negara bagi partai politik. Ia menyebut biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun dan meminta adanya penelitian untuk membandingkan besaran tersebut dengan dukungan pendanaan partai politik.

(dho/*)



Penyadapan Presiden, Komisi III Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain," ujar Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan Komisi III DPR RI menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal acces dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Polri membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan.

"Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?" tandas Habib Aboe.

Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung, seraya mengingatkan bahwa pengungkapan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan dan aktor di belakangnya terungkap.

"Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut," tegasnya.

Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.

Menutup pernyataannya, Habib Aboe pun lantas mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.

"Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak," pungkasnya.

Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. **(fex/*)**

Lebih Elegan, Pengunduran Diri Gibran Demi ...

Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Seperti diketahui, Gibran memutuskan mengundurkan diri menyusul polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat dalam pencalonan di Pilpres. Setelah menyampaikan mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran hari ini memberikan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR RI.

Gibran datang ke kompleks parlemen untuk memberikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR hanya 2 jam sebelum dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.

Usulan soal HMP sendiri telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan atau seluruh fraksi yang ada di DPR dan akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk diputuskan. Namun karena Gibran sudah mengundurkan diri, usulan soal HMP dibatalkan sehingga Rapat Paripurna DPR pun dibatalkan digelar.

"Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama," papar Sudding yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN MPR ini.

Adapun Sudding menjadi salah satu Anggota DPR yang memulai dorongan soal usul HMP pemakzulan Gibran. Ia juga menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang memberikan tanda tangan dalam usulan HMP.

Menurut Sudding, usulan HMP atau proses pergantian Wapres di MPR merupakan hal mendesak mengingat Gibran sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum dengan adanya putusan MA, yang juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.

"Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita," ungkap Sudding.

Ditambahkan Sudding, keputusan Gibran mengundurkan diri juga dapat menjaga stabilitas politik. "Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR," jelasnya.

"Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban," imbuh Sudding.

Sudding juga menyoroti bagaimana kesolidan anggota DPR dalam menyikapi permasalahan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. "Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik," ucapnya.

"Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi," sambung Sudding.

Sudding mengingatkan, jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Lebih dari itu, proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi," ujarnya.

Dengan pengunduran diri Gibran, MPR RI nantinya akan menggelar Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti yang harus diselenggarakan maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

Dalam proses pemilihan pengganti Gibran, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wapres pengganti beserta syaratnya selambat-lambatnya 14 hari sebelum paripurna. Setelahnya, MPR membentuk tim verifikasi (maksimal 5 persen anggota MPR) yang bekerja selama 7 hari untuk memeriksa dokumen kandidat.

Calon Wapres pengganti yang lolos verifikasi lalu akan menyampaikan pernyataan kesiapan, kemudian dipilih melalui pemungutan suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Sudding berpandangan pengunduran diri Gibran berkaitan juga dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. "Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya," urai Sudding.

"Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tegasnya. **(din)**

pernak Pernik

HOTLINE: 0813 1839 6433 (HUNTING)
redaksipelitabaru@gmail.com
sirkulasipelitabaru@gmail.com
iklanpelitabaru@gmail.com

HARIAN UMUM Pelita Baru
KRITIS AKURAT DAN TERPERCAYA

EDISI 1869 | JUMAT, 13 NOVEMBER 2026

Pantai Clungup

PASIR PUTIH MEMBENTANG BAK PERMADANI ALAM



PANTAI Clungup adalah pantai di pesisir selatan Pulau Jawa yang terletak di tepi Samudera Indonesia. Secara administratif berada di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pasir di Pantai Clungup berwarna putih yang membentang sekurangnya setengah kilometer. Pantai ini cukup terlindungi oleh perbukitan dan banyak kebun penduduk. Tidak ada sampah yang berserakan, hanya saja terdapat serpihan kayu-kayu yang terbawa ombak terdampar di beberapa bagian pantai. Sudah ada beberapa tempat sampah terbuat dari anyaman bambu berjajar di sepanjang pantai.

Ombak di Pantai Clungup cukup tenang sampai jarak sekitar 500 meter karena pantai dilindungi beberapa pulau kecil di lepas pantai. Terkadang ombak cukup deras menyapu tepian pantai. Kedalaman pantai cukup dangkal, sehingga bisa untuk berenang di sepanjang tepian pantai.

Di dasar pantai banyak batu dan karang yang tentunya cukup tajam. Pada saat sore hari sering kali ditemui ubur-ubur kecil yang terdampar di tepi pantai.

Panorama yang terlihat yakni tiga buah pulau kecil dan karang-karang. Suasananya masih alami. Karangnya disana cukup tajam. Sejauh mata memandang terlihat keasrian panorama Pantai Clungup yang sangat berbeda dari pantai-pantai lain. Di sekitar pantai masih banyak terdapat hutan bakau yang masih lebat. Bila ingin ke Pantai Goa China bisa berjalan ke sisi kanan dari Pantai Clungup.

Di pantai ini sulit untuk menemukan air bersih. Biasanya hanya ada petani, warga sekitar yang sedang memancing atau bekerja di kebun mereka.

Pantai ini jarang diketahui orang kebanyakan karena letaknya yang cukup terpencil dari pemukiman penduduk. Namun, sebenarnya, jalan untuk menuju Pantai Clungup cukup mudah.

Dari Kota Malang, pengunjung bisa mengikuti penunjuk arah yang akan menuju Pantai Sendangbiru. Setelah itu berbelok ke kanan menuju arah pantai Goa China. Setelah memasuki Goa China berjalan ke arah sebelah timur sejauh sekitar 500 meter. Jadi, sebaiknya kendaraan bermotor diparkir dulu di Pantai Goa China.

Dari Goa China harus ditempuh dulu dengan berjalan kaki di sebuah jalan setapak dengan melewati perkebunan penduduk dan lereng perbukitan. Setelah melewati bukit tersebut maka sampailah di Pantai Clungup.

Bisa juga ke Pantai Clungup tanpa harus memasuki Pantai Goa China, tetapi medannya cukup berat. Setelah melewati perempatan Jalan Lintas Selatan, berbelok ke kiri yang akan menuju ke Sendangbiru. Sekitar 200 meter kemudian berbelok kanan ke sebuah jalan agak lebar dan pengunjung bisa menitipkan kendaraan di rumah penduduk di sekitar sini.

Dari sini pengunjung hanya dapat meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki karena harus melalui jalan setapak. Tidak seberapa jauh kemudian berbelok ke sebuah jalan setapak di sebelah kiri. Dari sini terus saja dan akan melewati perkebunan penduduk sejauh sekitar satu kilometer. Tidak berapa lama terdapat sebuah sungai dan bukit, dan harus menyeberangi sebuah muara sungai. Barulah setelah berjalan sekitar 20 menit akan sampai di Pantai Clungup. **(sumber: id.wikipedia.org)**





ISTIMEWA

Sistem TAR/Poin Akan Diterapkan, SIM Bisa Dicabut Permanen

Jakarta, Pelita Baru

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri berencana menerapkan sistem traffic attitude record (TAR) atau catatan perilaku pengendara di jalan raya.

Melalui sistem tersebut, Korlantas akan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi atau reward and punishment berdasarkan sistem poin atau merit point system.

"Itu sudah berlaku di beberapa negara maju bahwa akan ada reward terhadap masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas hingga pada saatnya nanti perpanjangan dia bisa langsung," ujar Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin, baru-baru ini, dikutip dari Kompas.com.

Jika poin penalti mencapai batas tertentu, pengendara bisa diwajibkan mengikuti ujian ulang untuk mendapatkan SIM.

"Bahkan, mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut," tambah Aries.

Dia mencontohkan, pencabutan SIM bisa dilakukan terhadap pengendara yang terlibat tabrak lari dan melarikan diri, apabila perbuatannya telah diputus oleh pengadilan.

Pada kesempatan itu Kakorlantas Polri menegaskan masa berlaku SIM lima tahun, bukan seumur hidup. Masa berlaku SIM lima tahun dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menegaskan, tidak ada kebijakan yang memberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup.

"Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi, kita masih aturan yang sekarang," kata Aries.

Aries mengatakan, aturan yang berlaku saat ini masih mengatur masa berlaku SIM selama lima tahun. Pemohon juga tetap harus membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai ketentuan. **(don)**

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polri Siap Gelar Operasi Zebra

Jakarta, Pelita Baru

MENJELANG Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menggelar Operasi Zebra untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Operasi yang dijadwalkan mulai pekan depan tersebut menyasar kesiapan kendaraan, kesehatan pengemudi, serta kondisi infrastruktur jalan.

Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin mengatakan, Operasi Zebra menjadi langkah awal menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki pendekatan serupa dengan Operasi Keselamatan yang dilaksanakan sebelum pengamanan hari besar.

"Operasi Zebra itu hampir sama dengan Operasi Keselamatan. Karena pada saat Operasi Zebra dilakukan, itu mendahului Operasi Nataru," ujarnya Aries, baru-baru ini, dikutip dari rri.co.id.

Pemeriksaan kelayakan angkutan umum akan dilaksanakan bersama Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan kendaraan. Pemeriksaan kesehatan pengemudi juga disiapkan karena keselamatan perjalanan tidak hanya bergantung pada kondisi kendaraan.

"Kita nantinya juga akan melaksanakan pengecekan kesehatan. Bukan hanya pengecekan narkoba, kesehatan juga akan ada," tambahnya.

Menurut Aries, Operasi Zebra tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga peningkatan pelayanan kepolisian. Karena itu, keberhasilan operasi tidak diukur berdasarkan banyaknya pengendara yang menerima sanksi tilang.

"Operasi itu adalah peningkatan pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas. Jadi, jangan sampai walaupun itu operasi, yang ditanya berapa tilangnya," ucapnya.

Melalui Operasi Zebra, Korlantas Polri berupaya meningkatkan kesiapan seluruh unsur keselamatan sebelum memasuki masa libur Nataru. Langkah tersebut mencakup pemeriksaan kendaraan dan pengemudi untuk mengantisipasi risiko kecelakaan selama peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat. **(don)**



https://www.metrotvnews.com/